

**LAPORAN PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN NAGARI
(LPPN)
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
TAHUN 2018**



**DISAMPAIKAN KEPADA
BUPATI KAB. PESISIR SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN
2018**

DAFTAR ISI

i	Kata Pengantar	i-ii
ii	Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	i-vii
iii	Daftar Isi	i-ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Dasar Hukum	1
	1.2. Gambaran Umum Nagari	2
	1.2.1. Kondisi Geografis	2
	1.2.2. Gambaran Umum Demografis	2
	1.2.3. Kondisi Ekonomi	7
	1.2.4. Struktur Pemerintahan Nagari	9
	1.2.5. Kelembagaan Nagari	11
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI	
	2.1. Visi dan Misi	17
	2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	17
	2.2.1. Strategi Pembangunan Nagari	17
	2.2.2. Arah Kebijakan Nagari	19
	2.3. Prioritas Pembangunan Nagari	21
	2.3.1. Bidang Keagamaan	21
	2.3.2. Bidang Pendidikan	22
	2.3.3. Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Keamanan	22
	2.3.4. Bidang Kesehatan	22
	2.3.5. Bidang Ekonomi	25
	2.3.6. Bidang Pemerintahan	25
BAB III	KEWENANGAN NAGARI	
	3.1. Hak Asal Usul Nagari	26
	3.1.1. Progran dan Kegiatan	26
	3.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	27
	3.1.3. Satuan Pelaksaan kegiatan nagari	27
	3.1.4. Permasalahan dan Penyelesaian	27
	3.2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten / Kota	28
	3.2.1. Progran dan kegiatan	28
	3.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	28
	3.2.3. Permasalahan dan Penyelesaian	30

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS DAN PEMBANTUAN

4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima	31
4.1.1. Dasar Hukum	31
4.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	31
4.1.3. Satuan Kerja Perangkat Nagari	32
4.1.4. Kegiatan Yang Diterima	32
4.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan	32
4.1.6. Permasalahan dan Penyelesaian	32

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

5.1. Kerjasama Antar Nagari	33
5.2. Kerjasama dengan Pihak Ke Tiga	33
5.3. Batas Nagari	34
5.4. Pencegahan Penanggulangan Bencana	35
5.5. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	36

BAB VI PENUTUP 39

LAMPIRAN :

RINGKASAN APB NAGARI TALUK TIGO SAKATO

	PENDAPATAN NAGARI	1.194.164.600,00
1	Pendapatan Asli Nagari	1.500.000,00,-
2	Bagi Hasil Pajak dan retribusi	28.871.800,00,-
3	Alokasi Dana Nagari	444.970.800,00,-
4	Dana Desa/Nagari (DD/N)	718.822.000,00,-
5	Hibah	-
6	Sumbangan Pihak Ke tiga	-
7	Bantuan dari Propvinsi	-

	BELANJA	
A	Belanja Langsung	
1	Belanja Pegawai / Honorarium	333.550.000,00,-
2	Belanja Barang dan Jasa	241.451.134,23,-
	Belanja pengadaan pakaian dinas	-
	Belanja pemerintah	-
3	Belanja Modal	616.668.899,89,-
	JUM LAH BENJA LANGSUNG	1.191.670.024,12,-
B	Belanja Tidak Langsung	
1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	168.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial	21.700.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan	-
4	Belanja Tak terduga	-
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	190.200.000,00
C	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	50.408.353,01,-
1	Sebelumnya	
2	Penjualan Aset Yang Dipisahkan	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-
2	Penyertaan Modal Nagari	-
3	Pembayaran Hutang Nagari	-

Taluk Tigo Sakato, 31 Desember 2018
 WATU NAGARI
 TALUK TIGO SAKATO
 BATANG KAPAS
 NOLRIANDI
 PESISIR SELATAN

Kode Rekening	Uraian Belanja	Target/ Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket. Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	1.234.164.600	1.197.221.154,61	37.443.445
1.1	Pendapatan Asli Nagari	41.500.000	42.000.000	
1.1.1	Hasil Badan Usaha Milik Nagari (BUMN)	-	-	-
1.1.2	Hasil Kekayaan Nagari	-	-	-
1.1.2.1	Tanah Kas Nagari	-	-	-
1.1.2.2	Pasar Nagari	-	-	-
1.1.2.3	Bangunan Milik Nagari	-	-	-
1.1.2.4	Objek Rekreasi Yang Dikelola Oleh Nagari	-	-	-
1.1.2.5	Pemandian Umum Yang Dikelola Oleh Nagari	-	-	-
1.1.2.6	Hutan Yang Dikelola Oleh Nagari	-	-	-
1.1.2.7	Tempat Pemancingan Yang Dikelolah Oleh Nagari	-	-	-
1.1.2.8	Tempat Pelelangan Ikan Yang Dikelola Oleh Nagari	-	-	-
1.1.2.9	Dst	-	-	-
1.1.3	Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat Nagari			-
1.1.4	Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	40.500.000	40.500.000	-
1.1.5	Hasil Retribusi Pelayanan Pemerintahan Nagari	1.500.000	1.500.000	-
1.1.5.1	Retribusi Pelayanan Perizinan Di Nagari	-	-	-
1.1.5.2	Retribusi Pelayanan Jual Beli Di Nagari	-	-	-
1.1.5.3	Retribusi Pelayanan Administrasi Surat	1.500.000	1.500.000	-
1.1.5.4	Restribusi lainnya			
1.1.6	Pungutan Nagari	-	-	-
1.1.7	Iyuran Masyarakat Nagari	-	-	-
1.2	Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintahan Kabupaten Terdiri Dari :	12.367.000	1.858.455	10.508.545
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah dari PBB P 2	11.197.300	11.197.300	-
1.2.2	Dst	-	-	-
1.3	Bagi Hasil Retribusi Dari Pemerintahan Kabupaten	5.307.500	5.307.500	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari	5.307.500	5.307.500	
1.3.2	Dst	-	-	-
1.4	Bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari terdiri dari :	-	-	-
1.4.1	Bantuan keuangan dari Pemerintah kepada Pemerintahan Nagari	718.822.000	691.887.099,61	26.934.900,39
1.4.2	Bantuan keuangan dari Provinsi kepada Pemerintahan Nagari	-	-	-
1.4.3	Bantuan keuangan dari kabupaten kepada Pemerintah Nagari	444.970.800	444.970.800	-

1.5	Hibah	-	-	-
1.5.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	-
1.5.2	Hibah dari Pemerintah Propvinsi	-	-	-
1.5.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-	-
1.5.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	-	-	-
1.5.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	-
1.5.6	Dst	-	-	-
1.6	Sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat	-	-	-
1.6.1	Sumbangan dari perantau	-	-	-
1.6.2	Sumbangan dari perusahaan donatur	-	-	-
1.6.3	Dst.	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.234.164.600	1.197.221.154,61	37.443.445

B. Pengelolaan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018

1. Target dan Realisasi Belanja (Pendapatan Asli Nagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten/ADPN, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Pendaptan lainnya yang Sah).

Tabel : Realisasi Pendapatan Asli Nagari Tahun 2018 yang Dipungut Langsung Oleh Pemerintahan Nagari Sungai Liku Pelangai.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Register Kartu Keluarga	-
2	Register KTP	490.000
3	Register Surat Nikah (NA)	-
4	Register Akta Kelahiran	150.000
5	Register Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB)	-
6	Register Surat Pengantar Keramaian	40.500.000
8	Hasil Gotong royong masyarakat Nagari	100.000
9	Retribusi Surat Keterangan Berdomisili	-
10	Register Surat Keterangan Bersih Diri	-
11	Register Surat Keterangan Bersih Lingkungan	150.000
12	Register Surat Keterangan Meninggal Dunia	100.000
13	Register Surat Keterangan Ahli Waris	130.000
14	Register Surat Keterangan Belum Pernah Nikah	100.000
15	Register Surat Keterangan Janda	180.000
	Register Surat Keterangan Usaha	100.000
	Register Surat Keterangan Penghasilan	42.000.000
Jumlah		

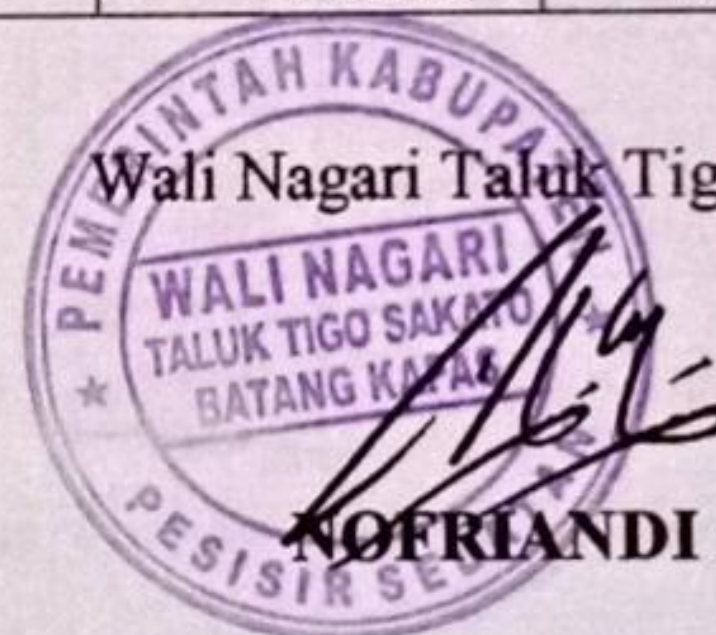
Tabel : Belanja Rutin dan Realisasi

Kode Rekening	Uraian Belanja	Target/ Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket. Lebih (Kurang)
2.1	Belanja Tidak Langsung	403.450.000	403.450.000	
2.1.1	Belanja Pegawai :	333.550.000	333.550.000	
2.1.1.1	Belanja Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat	186.500.000	186.500.000	
	-Wali Nagari @ Rp.2.300.000 x 1 x 7 bln	16.100.000	16.100.000	
	- Sekretaris Nagari @ Rp.1.700.000 x 1 x 1bln	20.400.000	20.400.000	
	- Kepala Seksi @ Rp. 1.500.000 x 2 x 12 bln	36.0000.000	36.000.000	
	-Kepala Urusan @ Rp 1.400.000 x 2 x 12 bln	33.600.000	33.600.000	
	-Kepala Kampung @ Rp 1.300.000 x 3 x12 bln	46.800.000	46.800.000	
	- Bendahara nagari @ Rp.1.300.000 x 1 org x12 bln	15.600.000	15.600.000	
	- Staf nagari @ Rp.750.000 x 1 org x12 bln	8.250.000	8.250.000	
	- Staf Bamus @Rp 750.000 x 1 org x 12 bln	8.250.000	8.250.000	
	-Staf Nagari @ Rp. 125.000 x 1 org x 12 bln	1.500.000	1.500.000	PAN
2.1.1.2	Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat	85.250.000	85.250.000	
	-Wali Nagari Non PNS @ Rp.1.300.000 x 1 x 7 bln	9.100.000	9.100.000	
	- Wali Nagari PNS @ Rp. 1.750.000 x 5 bln x 1 org	8.750.000	8.750.000	
	- Sekretaris Nagari @ Rp.1.000.000 x 1 x 1bln	12.000.000	12.000.000	
	- Kepala Seksi @ Rp. 600.000 x 2 x 12 bln	14.4000.00	14.400.000	
	-Kepala Urusan @ Rp 500.000 x 2 x 12 bln	12.000.000	12.000.000	
	-Kepala Kampung @ Rp 450.000 x 3 x12 bln	16.200.000	16.200.000	
	- Bendahara nagari @ Rp.700.000 x 1 org x12 bln	8.400.000	8.400.000	
	-Staf Nagari @ Rp. 200.000 x 1 org x 12 bln	2.200.000	2.200.000	
	- Staf Bamus @ Rp.200.000 x 1 org x12 bln	2.200.000	2.200.000	
2.1.1.3	Tunjangan Jaminan Perlindungan Keselamatan kerja dan Persiapan Purna Bakti Wali Nagari Rp.3.600.000	3.600.000	3.600.000	
2.1.1.4	Tunjangan Kehormatan Ketua dan Anggota BAMUS	58.200.000	58.200.000	
	- Kt.BAMUS Nagari @ Rp.1.150.000 x 1 org x 12bln	13.800.000	13.800.000	
	-Wakil Ketua BAMUS @ Rp.1.050.000 x 1 org x 12 bln	12.600.000	12.600.000	
	-Sekretaris BAMUS @ Rp.950.000 x 1 org x 12 bln	11.400.000	11.400.000	
	-Anggota BAMUS @ Rp.850.000 x 2 org x 12 bln	20.400.000	20.400.000	

2.1.2	Belanja Hibah/Bantuan Sosial :	28.900.000	28.900.000	
2.1.2.1	Bantuan Sosial Kepada Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan :	24.900.000	24.900.000	
	-KAN	3.500.000	3.500.000	
	-PKK	8.000.000	8.000.000	
	-LPMN	5.000.000	5.000.000	
	-Pemuda Nagari	1,200.000	1,200.000	
	-Bundo Kanduang			
	-MUI Nagari			
	-Posyandu	7.200.000	7.200.000	
2.1.2.2	Bantuan Sosial Lainnya :	4.000.000	4.000.000	
	-PHBN	1.000.000	1.000.000	
	-PHBI	1.000.000	1.000.000	
	-PORBI	1.000.000	1.000.000	
	-BABINSA NAGARI	500.000	500.000	
	-BABIMMAS NAGARI	500.000	500.000	
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.3.01	Belanja subsidi kepada BUM Nagari			
2.1.3.02	Dst.....			
2.1.4	Belanja Tak terduga :			
2.1.4.01	Keadaan Darurat	-	-	
2.1.4.02	Bencana Alam	-	-	
2.1.4.03	Dst			
2.2	BELANJA LANGSUNG	41.000.000	41.000.000	
2.2.1	BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH NAGARI :	30.000.000	30.000.000	
2.2.1.1	Belanja Barang Habis Pakai :	7.225.800	7.225.800	
2.2.1.1.01	ATK	5.773.800	5.773.800	
2.2.1.1.02	Bahan Bakar	600.000	600.000	
2.2.1.1.03	Peralatan Kebersihan dan Pembersih	332.000	332.000	
2.2.1.1.04	Alat Listrik dan Eletronic	520.000	520.000	
2.2.1.1.05	Barang Pakai Habis Lainnya.....(sebutkan)			
2.2.1.2	Belanja Jasa Kantor	2.640.000	2.640.000	
2.2.1.2.01	Belanja Telpon			
2.2.1.2.02	Belanja Listrik	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.2.03	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000	1.440.000	
2.2.1.2.04	Belanja Sertifikasi			
2.2.1.2.05	Belanja Jasa Kantor Lainnya.....(sebutkan)			
2.2.1.3	Belanja Perawatan	900.000	900.000	
2.2.1.3.01	Belanja Perawatan Kantor	900.000	900.000	
2.2.1.3.02	Dst.....			

2.2.1.4	Belanja Cetak dan Pengadaan :	1.404.200	1.404.200	
2.2.1.4.01	Belanja Cetak	300.000	300.000	
2.2.1.4.02	Belanja Pengadaan/foto copy	399.200	399.200	
2.2.1.4.03	Belanja Penjilitan	225.000	225.000	
2.2.1.4.0.4	Belanja Penjilitan APBN	240.000	240.000	
2.2.1.4.0.5	Belanja Spanduk	240.000	240.000	
2.2.1.5	Belanja Sewa	-	-	
2.2.1.4.01	Belanja Sewa Gedung Kantor	-	-	
2.2.1.4.02	Belanja Sewa Perlengkapan Kantor			
2.2.1.4.03	Belanja Sewa Peralatan Kantor			
2.2.1.4.04	Dst.....			
2.2.1.6	Belanja Makanan dan Minuman :	5.585.000	5.482.500	
2.2.1.6.01	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	1.100.000	1.100.000	
2.2.1.6.02	Belanja dan Minum Rapat	2.475.000	2.475.000	
2.2.1.6.03	Belanja dan Makan dan Minum Tamu	1.100.000	1.100.000	
2.2.1.6.04	Belanja Tak Terduga	1.000.000		
2.2.1.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut :	5.985.000	5.985.000	
2.2.1.7.01	Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari, Perangkat dan Papan Nama	4.485.000	4.485.000	
2.2.1.7.02	Belanja PDU Wali Nagari	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.8	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000	5.550.000	
2.2.1.8.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan (Wali Nagari dan Perangkat)	2.700.000	2.700.000	
2.2.1.8.02	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten (Wali Nagari dan Perangkatan)	3.350.000	3.350.000	
2.2.1.8.03	Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi (Wali Nagari dan Perangkat)	850.000	850.000	
2.2.2	Belanja Operasional BAMUS Nagari :	11.000.000	11.000.000	
2.2.2.1	Belanja Barang Pakai Habis	1.324.800	1.324.800	
2.2.2.1.01	ATK	884.800	884.800	
2.2.2.1.02	Bahan Bakar	225.000	225.000	
2.2.2.1.03	Peralatan Kebersihan dan Pembersih	86.000	86.000	
2.2.2.1.04	Alat Listrik dan Eletronic			
2.2.2.1.05	Blangko, Matrei dan Benda Pos	129.000	129.000	
2.2.2.2	Belanja Jasa Kantor			
2.2.2.2.01	Belanja Telpon			
2.2.2.2.02	Belanja Listrik			
2.2.2.2.03	Belanja Surat Kabar/Majalah			
2.2.2.2.04	Dst.....			
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Pengadaan :	210.200	210.200	
2.2.2.4.01	Belanja Cetak	100.000	100.000	
2.2.2.4.02	Belanja Pengadaan/foto copy	110.200	110.200	
2.2.2.4.03	Dst.....			
2.2.2.5	Belanja Sewa			

2.2.2.5.01	Belanja Sewa Gedung Kantor			
2.2.2.5.02	Dst.....			
2.2.2.6	Belanja Makanan dan Minuman :	2.040.000	2.040.000	
2.2.2.6.01	Belanja Makan dan Minum Harian	550.000	550.000	
2.2.2.6.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.490.000	1.490.000	
2.2.2.6.03	Dst.....			
2.2.2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut :	2.400.000	2.400.000	
2.2.2.7.01	Belanja Pakaian Anggota Bamus Nagari	2.400.000	2.400.000	
2.2.2.7.02	Dst.....			
2.2.2.8	Belanja Perjalanan Dinas	2.225.000	2.225.000	
2.2.2.8.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan (Nagari dan Kecamatan)	750.000	750.000	
2.2.2.8.02	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten/ Kecamatan Lain	875.000	875.000	
2.2.2.8.03	Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi	600.000	600.000	
2.2.2.9	Belanja Sidang BAMUS Nagari	2.800.000	2.800.000	
	-Ketua (1 org x 4 kali x Rp. 150.000)	600.000	600.000	
	-Wakil Ketua (1 org x 4 kali x Rp. 125.000)	500.000	500.000	
	-Sekretaris (1 org x 4 kali x Rp. 125.000)	500.000	500.000	
	-Anggota (2 org x 4 kali x Rp. 100.000)	800.000	800.000	
	-Staf (1 org x 4 kali x Rp. 100.000)	400.000	400.000	



Wali Nagari Taluk Tigo Sakato

Tabel : Belanja Pembangunan dan Realisasi

Kode Rekening	Uraian Belanja	Target/ Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket. Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
2.2.3	BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ PEMBANGUNAN :	771.677.000	743.177.000	28.500.000
2.2.3.1	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Nagari :	127.358.500	98.858.500	
2.2.3.1.01	Tambahan Modal BUMNAG	20.000.000	-	20.000.000
2.2.3.1.02	Insentif Kader Yandu	12.000.000	12.000.000	
2.2.3.1.03	Insentif Kader PPKBD	900.000	900.000	
2.2.3.1.04	Insentif SUB PPKBD	2.160.000	2.160.000	
2.2.3.1.05	Insentif Guru TPA / TPSA	30.600.000	30.600.000	
2.2.3.1.06	Insentif Guru MDA dan Buku Belajar	15.000.000	15.000.000	
2.2.3.1.07	Insentif Guru dan OP TK - PAUD	12.912.500	12.912.500	
2.2.3.1.08	Insentif Kader Nagari Siaga	1.800.000	1.800.000	
2.2.3.1.09	Kegiatan Pokja 1,2,3 dan 4 TP - PKK	4.000.000	4.000.000	
2.2.3.1.10	Pembuatan Lapangan Olah Raga	4.241.000	4.241.000	
2.2.3.1.11	Kegiatan didikan Subuh	3.335.000	3.335.000	
2.2.3.1.12	Kegiatan Seni Budaya Randai	4.410.000	4.410.000	
2.2.3.1.13	Kegiatan Majelis Ta'qlim	3.150.000	-	3.150.000
2.2.3.1.14	Kegiatan Kasidah Rabbana	3.650.000	2.000.000	1.650.000
2.2.3.1.15	Pelatihan Kelompok Tani	5.500.000	5.500.000	
2.2.3.1.16	Pelatihan Pengurus BUMNAG	3.700.000	-	3.700.000
2.2.3.2	Belanja Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan Nagari :	577.667.500	577.667.500	
2.2.3.2.01	Pembangunan Penimbunan dan Pagar TK PAUD	98.375.000	98.375.000	
2.2.3.2.02	Pembangunan Parit Miring Parak Pisang - Manjanang	160.875.000	160.875.000	
2.2.3.2.03	Pembangunan Jambatan Kelompok Tani Bakuang	119.900.000	119.900.000	
2.2.3.2.04	Pembangunan Jembatan dan Pernimbunan Jalan Kelompok Tani Bukit Batuang	85.050.000	85.050.000	
2.2.3.2.05	Pencoran Lantai Jembatan Kampung Pani Koto Panjang	12.165.000	12.165.000	
2.2.3.2.06	Pembangunan Perpustakaan Nagari Taluk Tigo Sakato	29.927.500	29.927.500	
2.2.3.2.07	Pembangunan Pos Yandu Kampung Koto Keduduk	26.375.000	26.375.000	
2.2.3.2.08	Pembangunan Rumah Sehat Tidak Layak Huni / Fakir Miskin	30.000.000	30.000.000	
2.2.3.2.09	Bantuan Pembangunan Jambanan Masyarakat	15.000.000	15.000.000	
2.2.3.3	Belanja Pembangunan Sarana & Prasarana Pemasaran Nagari :			
2.2.3.4.01	Pembangunan Pasar Nagari di.....			
2.2.3.4.02	Rehab Pasar Nagari			
2.2.3.4.03	Pembangunan Toko Nagari di.....			

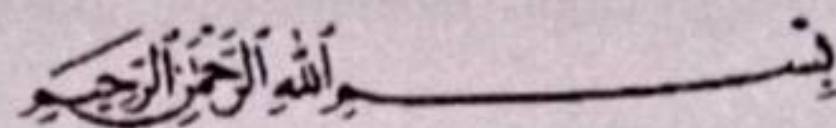
2.2.3.4.04	Pembangunan Ruko Nagari di.....			
2.2.3.4.05	Dst.....			
2.2.3.5	Belanja Pembangunan Sarana & Prasarana Parawisata Nagari :			
2.2.3.5.01	Pembangunan/Rehab Tempat Pemandian Umum Nagari			
2.2.3.5.02	Pembangunan Kolam Renang Nagari			
2.2.3.5.03	Pembangunan Prasarana Objek Wisata Nagari			
2.2.3.5.04	Dst.....			
2.2.3.6	Belanja Pembangunan Sarana & Prasarana Sosial Budaya Nagari :	17.951.000	17.951.000	
2.2.3.6.01	Pelaksanaan Sapari Ramadan Nagari	2.500.000	2.500.000	
2.2.3.6.02	Pembangunan Gedung MDA,TPA/TPSA			
2.2.3.6.03	Pengadaan Perlengkapan MDA,TPA/TPSA			
2.2.3.6.04	Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Nagari			
2.2.3.6.05	Pembangunan Pos Kamling Nagari			
2.2.3.6.06	Pengadaan Perlengkapan Group Kesenian Tradisional Nagari	4.410.000	4.410.000	
2.2.3.6.07	Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga	4.241.000	4.241.000	
2.2.3.6.08	Bantuan Kegiatan Majelis Taq'lim	3.150.000	3.150.000	
2.2.3.6.09	Bantuan Kasidah Rabbana	3.650.000	3.650.000	
2.2.3.7	Belanja Pembangunan Lain-lain :	48.700.000	48.700.000	
2.2.3.7.01	Pelatihan/Bintek Wali Nagari dan Bamus	18.000.000	18.000.000	
2.2.3.7.02	Pembuatan Peta Nagari	-	-	
2.2.3.7.03	Pembuatan Monografi/Profil Nagari @ Rp.4.500	-	-	
2.2.3.7.04	Kegiatan Musrembang Nagari	3.700.000	3.700.000	
2.2.3.7.05	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.7.06	Bantuan pemilihan Wali Nagari	25.000.000	25.000.000	
2.2.3.7.07	Bantuan Biaya pelantikan Wali Nagari			
	Jumlah Total	771.677.000	743.177.000	28.500.000

Wali Nagari Taluk Tigo Sakato

PEMERINTAH KABUPATEN
WALI NAGARI
TALUK TIGO SAKATO
BATANG KAPAS
PESISIR

NOFRIANDI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI (LPPN) TAHUN 2018



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji dan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018. Laporan ini disusun secara formal untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Kemudian salawat beriring salam kita mohonkan kehadiran Allah SWT, semoga dilimpahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan ini kami sajikan dengan sistematika, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi Dasar hukum dan gambaran umum penyelenggaraan pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato
- Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Taluk Tigo Sakato
- Bab III Kewenangan Nagari yang berisi urusan hak asal usul Nagari dan urusan daerah yang diserahkan pemerintah kabupaten/ kota.
- Bab IV Penyelenggaraan Tugas dan Pembantuan, berisi pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dan yang diberikan kepada Nagari.
- Bab V Penyelenggaran Urusan pemerintah lainnya.
- Bab VI Penutup

Disamping itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari tahun 2018. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah.

Kami dari Pemerintahan Nagari menyadari dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki belum bisa semaksimal mungkin untuk mencapai apa-apa yang diinginkan oleh

masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato, tapi walaupun demikian kami pun merasakan bahwa kita telah bekerja dengan baik dan telah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan bidang kita masing-masing.

Kemudian pada kesempatan ini, kami akan melaporkan semua kerja sama yang sudah kita jalani selama kami diangkat, khususnya untuk tahun 2018 ini. Harapan kami semoga semua materi laporan kegiatan ini dapat dimaklumi dan dipahami. Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari ini disampaikan supaya kita dapat mengevaluasi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2018 sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari..

Selama tahun Anggaran 2018 ini, proses pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah kita ambil menghadapi tantangan, kendala dan hambatan namun Insyaallah masih dapat diatasi dengan musyawarah dan mufakat.

Taluk Tigo Sakato, 29 Desember 2018.

WALI NAGARI
TALUK TIGO SAKATO

NOFRIANDI

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2018

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

Di dalam melaksanakan setiap kegiatan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato, Wali Nagari mengedepankan kerjasama dengan semua lembaga dan unsur yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa mencapai hasil yang memuaskan.

Kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Program Dana alokasi Pembangunan Nagari Taluk Tigo Sakato meliputi beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Fisik
 - Pembangunan Pondasi kantor Wali Nagari Taluk Tigo Sakato
 - b. Sosial Budaya dan Pendidikan
 - Bantuan
2. Bantuan Operasional Nagari digunakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga kerja dan profesionalisme perangkat menjadi meningkat
3. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Nagari Taluk Tigo Sakato dibelanjakan dengan semestinya.

Di samping dukungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di nagari Teluk Tigo Sakato, swadaya masyarakat sangat banyak memotivasi program-program yang diturunkan. Swadaya tersebut terbagi dalam beberapa bentuk seperti berupa materi, tenaga dan sumbangan pemikiran.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN / KOTA

Program Dan Kegiatan

Program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2018 berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2017, sebahagian besar dapat dilaksanakan walaupun masih ada kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan tahun sebelumnya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kabupaten/Kota antara lain :

1. PNPM-MP dengan kegiatan Pengembangan Dana Bergulir SPP dalam rangka menunjang peningkatan permodalan bagi masyarakat Nagari.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi beberapa kegiatan antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Nagari merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa / nagari dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa / nagari.

Pelayanan prima mengandung Pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti. Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :

1. Berorientasi kepuasan pelanggan.
2. Perbaikan yang kesinambungan.
3. Manajemen berdasarkan fakta.
4. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia.
6. Budaya organisasi adalah moral tinggi.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Nagari karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa / nagari.

Mendasari ketentuan dari prinsip - prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa / Nagari telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain :

1. Pembagian tugas masing - masing Kasi dan Kaur.
2. Sistem buka kantor tepat waktu.
3. Pelayanan cepat.
4. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat

Pelaksanaan pada bidang pemerintahan telah dilaksanakan kegiatan guna menunjang program pemerintah serta memberikan layanan yang maksimal pada masyarakat, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan KTP
 - b. Pengurusan Pembuatan IMB
 - c. Bidang Administarsi lainnya
2. Bidang Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan pada bidang sarana dan prasarana meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Sarana Transportasi (Pembangunan Jalan dan Jembatan kesentra usaha masyarakat melalui swadaya masyarakat)
- b. Penetapan Tempat Pembukaan dan Pengecoran Jalan ke bukit Batuang Tanjung Durian yang rencananya akan di bangun tahun 2018

Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka realisasi dari pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2018 meliputi beberapa hal antara lain :

- Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan usaha pertanian yang timbul adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat dengan program-program pemerintah dalam percepatan pembangunan di daerah-daerah yang mendapatkan bantuan sehingga pencapaian target pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan.

Akan tetapi berkat usaha dari Pemerintahan Nagari memberikan dan menyampaikan maksud dan tujuan dari suatu program pemerintah terhadap pembangunan baik fisik maupun non fisik pada suatu daerah, permasalahan yang timbul tersebut dapat diperkecil.

- Faktor lain yang juga menjadi permasalahan adalah faktor cuaca. Faktor cuaca yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan juga menjadi masalah dalam penyelesaian kegiatan,

akan tetapi berkat usaha dan arahan kegiatan-kegiatan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan ini tidak terlepas dari kebersamaan dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

- Faktor Kesadaran masyarakat dalam bekerjasama (gotong Royong) dengan kurangnya rasa kebersamaan dalam membangun nagari hal ini terlihat pada saat dilaksanakan Gotong Royong yang hadir lebih banyak dari para petani dan nelayan sedangkan masyarakat yang bergerak dibidang jasa sangat kecil sekali.

Akan tetapi pemerintah nagari tidak akan bosan untuk mengajak (mengundang) masyarakat yang bergerak dibidang jasa untuk melaksanakan kegiatan gotong royong dalam menunjang pembukaan jalan ke sentra ekonomi masyarakat.

C. TUGAS PEMBANTUAN

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, instansi pemberi tugas adalah :

- Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Satuan Kerja Perangkat Nagari

Untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan pembantu pada pembangunan Nagari Tahun 2018, Nagari telah membentuk Panitia yang terdiri dari :

1. Aparatur Nagari
2. Kepala Kampung

Kegiatan Yang Diterima

Kegiatan Pembantuan yang diterima oleh Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato Pada tahun 2018 ini diantaranya adalah Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh kolektor yang dibentuk oleh pemerintah Nagari melalui Kepala Kampung dan Staf Nagari yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato.

Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Sumber dana dan jumlah Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan tugas dan pembantuan yang diterima selama ini belum mempunyai sumber dana dan anggaran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan pembantuan.

Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan di Nagari Taluk Tigo Sakato ini memang terkendala dengan masih ditemukannya lembaran SPT yang tidak jelas sehingga masyarakat merasa terbebani dengan SPT tersebut.

Permasalahan tersebut diatas telah dicoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat berkeinginan untuk membayar kewajibannya, ditambah dengan banyaknya bantuan yang telah diterima Nagari bila dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada Negara.

D. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

Kebijakan Dan Kegiatan

Kebijakan Dan Kegiatan

Adapun kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan nagari Taluk Tigo Sakato antara lain *Pembangunan Jembatan Kelompok Tani Bakuang, Pembangunan Pagar Tembok TK-PAUD TUNAS HARAPAN, Pembangunan Parit Miring Parak Pisang – Banjanang, Perbaikan dan Pengocoran Lantai Jemabatan Kampung Panai Koto Panjang, Pembangunan Perpustakaan Nagari, Pembangunan Pos Yandu Koto Keduduk, Bantuan Rumah Sehat Tidak Layak Huni dan Pembangunan Jambanan Masyarakat. Pembangunan*

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dari dari keja sama tersebut telah dilaksanakan secara keseluruhan dan wali nagari memberikan dukungan atas pelasanaannya sehingga hubunga transportasi berjalan lancar terutama jalan keperkampungan dan transportasi ke perkebunan.

Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya swadaya gontong royong masyarakat dan pemerintahan kabupaten sehingga dalam pengerjaannya hanya menitik beratkan kepada pihak-pihak yang terkaid saja..

E. KERJASAMA DENGAN DENGAN PIHAK KE III

Kebijakan Dan Kegiatan

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari Taluk Tigo Sakato pada tahun 2018 lebih dititik beratkan pada kegiatan antara lain :

1. Pertandingan Olah Raga
2. Buayan Kaling

Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari pihak ke III seperti :

1. Perantau (dalam Provinsi maupun di luar Provinsi)
2. Donatur lainnya yang tidak mengikat.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan di atas bantuan yang diterima oleh Pemerintahan Nagari dari pihak ke III yang tersebut diatas sangatlah memberikan dorongan dan motivasi guna suksesnya kegiatan tersebut diatas.

Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dirasakan karena terbatasnya jarak dan waktu yang sangat pendek, sehingga masih adanya pihak ke III yang belum terhubung. Untuk menindaklanjuti keterbatasan tersebut pihak Pemerintah Nagari akan berusaha untuk memberikan informasi secepat mungkin pada kegiatan-kegiatan yang akan datang.

BAB I

PENDAHULAN

Dengan berakhirnya pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2018 maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007, pasal 13 ayat (2) tentang Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN) kepada Bupati di akhir masa jabatan dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada BAMUS Nagari.

LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang telah dilaksanakan oleh Wali Nagari. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPJ Wali Nagari sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Nagari, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Nagari, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Peyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari khususnya pasal 8 ayat (20) s/d (8), bahwasanya Wali Nagari agar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ) kepada BPRN dalam rapat paripurna BPRN.

1.2. GAMBARAN UMUM NAGARI

1.2.1. Kondisi Geografis

Nagari Taluk Tigo Sakato merupakan salah satu dari 9 Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Batang Kapas yang letaknya sangat strategis dengan kekayaan alam yang cukup sebagai arel pertanian, pekebunan, dan kelautan.

Disamping daerahnya yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai masyarakat nagari Taluk Tigo Sakato termasuk kedalam nagari yang memiliki integritas yang tinggi antar sesamanya.

Dengan jumlah penduduk 2.565 jiwa serta luas daerah $\pm$ 37.276 Ha. Di Nagari Taluk Tigo Sakato yang terdiri dari 3 Kampung, yakni :

1. Kampung Koto Keduduk
2. Kampung Tanjung Kandis
3. Kampung Koto Panjang

Secara geografis Nagari Taluk Tigo Sakato pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Pertanian dan Perkebunan, dan sunagai yang dengan air yang bersih dan pengunungan yang hijau menjulang tinggi menghadirkan pemandangan yang indah serta udara yang bersih dan sejuk.

1.2.2. Gambaran Umum Demografis

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Nyalo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Taratak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Solok Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Taluk

1.2.1.1. Demografi

a) *Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk*

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing.

Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Hasil Pendataan Penduduk melalui Data yang dihimpun masing-masing kepala kampung awal tahun 2018, bahwa jumlah penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato sebesar $\pm$ 2.565 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudik

NO.	KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK
1	Koto Keduduk	1.027
2	Tanjung Kandis	1.023
3	Koto Panjang	515
	Jumlah	2.565

Sumber : Rekap Hasil Pendataan PKB/Kader di Nagari.

b) *Sex Ratio*

Dalam penyusunan Laporan keterangan pertanggung jawaban Nagari Taluk Tigo Sakato, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Hasil Pendataan PKB Tahun 2018 bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Taluk Tigo Sakato adalah sebesar 2.565 jiwa, dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

Sex Ratio Penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato

NO.	KAMPUNG	PENDUDUK			SEX RATIO
		L	P	TOTAL	
1	Koto Keduduk	498	529	1.027	
2	Tanjung Kandis	495	528	1.023	
3	Koto Panjang	241	274	515	
	Jumlah	1.234	1.331	2.565	

Sumber : Rekap Hasil Pendataan PKB/Kader di Nagari.

c) *Kepadatan dan Penyebaran Penduduk*

Kepadatan penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato tergolong normal bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato menyebar di Tiga kampung karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

d) *Struktur Umur*

Kondisi struktur umur penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato sampai dengan akhir tahun 2014 tergolong komposisi struktur penduduk usia muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato

NO.	KELOMPOK UMUR	2018
1	0 - <1 Thn	84
2	1 - <5 Thn	82
3	5 - 6	168
4	7 - 15	474
5	16 - 21	381
6	22 - 59	1.031
7	60 - keatas	345
	Jumlah	2.565

Sumber : Rekap Hasil Pendataan PKB/Kader di Nagari.

e) *Tingkat kelahiran (Fertifitas)*

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita.

Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala

rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera. Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 17-40 tahun.

Hal ini dikarenakan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia tersebut diatas, ini disebut wanita usia subur (*WUS*) dan pasangan usia subur (*PUS*) bagi yang berstatus kawin. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelahiran di suatu daerah adalah TFR (*Total Fertility Rate*) yang menggambarkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya.

Tingkat kelahiran yang terjadi di Nagari Taluk Tigo Sakato cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini sebagai indikasi kesadaran untuk membatasi kelahiran semakin tinggi. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita, karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang.

Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan.

Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran.

Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama (*melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB*), semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

1.2.1.2. Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman.

Kondisi Nagari Taluk Tigo Sakato relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, dan Pariwisata. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif.

Hutan dan Pekebunana yang memberikan kontribusi yang cukup baik pada masyarakat belum dikelola secara baik dan maksimal, hal ini disebabkan Pekebun yang ada masih bersifat tradisional serta kekayaan alam yang sangat Melimpah belum memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.2.1.3. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir atau pun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai yang melintasi Nagari Taluk Tigo Sakato belum memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi Masyarakat, bahkan dimusim tertentu (hujan) air sungai akan membawah bencana banjir bagi masyarakat yang merendam daerah pemukiman serta lahan pertanian masyarakat. Aliran sungai yang melintasi Nagari Taluk Tigo Sakato belum dimanfaatkan secara baik sebagai sumber ekonomi masyarakat umum yakni dalam pembentuk Ikan Larangan sebagai salah satu sumber pendapatan nagari.

1.2.1.4. Sejarah Pemerintahan Nagari

Wali Nagari yang menjabat sebagai Wali nagari Taluk Tigo Sakato dimekarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 9 Tahun 20011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas sampai sekarang dapat di lihat pada tabel berikut ini :

NO	NAMA	SUKU	PERIODE PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	AFRIJON,SH	Malayu	Pemekaran Nagari	S 1
2	EFRIADI, S.A	Sikumbang	1 Januari 2012 – Desember 2017	S 1
3	RAJA RATMAN, SE	Pliang	Pj. Wali Nagari	S 1
4	NOFRIANDI	Panai	Priode Pertama (6 Tahun) 2018 - 20124	SLTA

1.2.1.5. Asal Usul / Legenda Nagari

1. Sejarah Nagari

Asal mulanya Nagari Taluk Tigo Sakato adalah Mekaran dari Nagari Taluk yang bersumber dari Lengda Sungai Tuak ada ungkapan yang mengatakan bahwa nama nagari di ambil dari kata TALUK dengan ketua Kerapatan Adat Ibu Abbas Dt R Bagindo. Konon korang Portugis pernah datang kesitu. Penduduk Pesisir Selatan umumnya menyambut orang Portugis dengan sebutan UPIK atau RUQIK dalam

Kaba Nangombang orang Portugis di sebut Raja Sipatoka orangnya berbadan besar dan Tinggi pada mulanya mereka berdagang secara murni di Taluk tapi kelamaan memaksa menjual barangnya dan membeli hasil Bumi dengan harga yang di tentukannya. Kemudian mereka memrampas, apa saja barang – barang mereka mau.

Karena masyarakat Taluk mulai melawan sering terjadi sangketa dan kerusuhan. Maka dicari akal, bagaimana membunuh orang besar – besar seperti itu akhirnya pemimpin menemui cara yang tepat dan sangat dirahasiakan

Pemimpin Taluk mengundang Portugis untuk berunding tujuanya untuk menghindari sangketa dan untuk melancarkan kehendak orang Upik itu tanpa sengketa dan akhirnya orang upik setuju

**TALUK MASA BUKIT SIGADING
(SEKITAR 1000 MASEHI)**

Dibawah akan di jelaskan;

1. *Lokasi dan masa berlangsungnya
Pemukiman Bukit Si Gading*
2. *Garis pantai masa Bukit Si gading*
3. *Asal mula penduduk Taluk*

GARIS PANTAI MASA BUKIT SI GADING

Kalau kita teliti cerita rakyat tentang batu Gulung kasur, memberitahu kepada kita bahwa dahulu hampir semua Tanah Taluk digenangi laut. Sawah – sawah dan perkampungan sekarang, dahulunya laut . kalau demikian halnya tentu Bukit Lintang dan Bukit Rawang dahulunya meruakan Pulau.

Menurut cerita itu garis pantai berada di kaki – kaki bukit, sehinga membentuk Teluk yang jauh menjorok ke darat. Inilah bentuk bumi taluk pertama dan ini pula asal mula nagari ini bernama taluk, yaitu dari kata Teluk Cerita Rakyat Batu Gulung Kasur mengenai garis pantai , mungkin dapat di percaya karena pantai kita ini sekarang memang bertambah jauh ke barat dari masa dahulu.

PERPINDAHAN PENDUDUK

Sekitar tahun 1000 Masehi Kerajaan Sriwijaya sering menyerang dan mendesak kerajaan Melayu sampai – sampai ke hulu Jambi yaitu sekitar Bangko – Kerinci (ada Prasasti ditemukan di sekitar Bangko tentang ini) mungkin itu sebabnya banyak orang Melayu mengungsi lebh jauh ke hulu, antara lain ke sungai pagu. Keudian dari sunga pagu mereka menemukan puncak Bukit Barisan, yaitu hulu sungai ang mengalir ke barat (Lautan Hindia)

Lewat hulu sungai itulah mereka sampai ke Kambang lewat Batang Lengayang , atau sampai ke Langgai lewat Batang Surantih. Dari kedua aliran sungai ini nenek moyang Taluk dari Sungai Pagu pindah ke Taluk. Rombongan ini adalah gelombang pertama yang masuk lewat hulu sungai mereka pindah secara berangsur – angsur dalam puluhan bahkan ratusan tahun mereka hidup bersawah atau berladang.

Gelombang kedua datang dari Utara, yaitu dari padang, Painan, Kampung Ladang Taluak Kasi, Sapan, Limau Mani dan sebagainya mereka masuk lewat perjalanan Darat dan pantai

Zaman modern ini, ada yang datang dari IV Koto Mudik, IV Koto Ilir dan Pariaman dari Kerinci, dari Indopuro dan banyal lagi mereka menetap dan hidup di Taluk.

MASA PEMERINTAHAN RIMBO APA (SEKITAR 1500 MASEHI)

Dibawah ini akan di ceritakan

1. Letak Rimbo Apa
2. Pembentukan Nagari buat pertama kali
3. Bentuk Pemerintahan
4. Waktu dan keadaan Bumi Taluk masa Rimbo Apa
5. Legenda Malain Deman

Rimbo Apa terletak di pingir sungai tempat pertemua Dua sungai yaitu sungai Tanjung Kandis dan Sungai Koto Panjang, Rimbo Apa , ibarat Euftrat dan Tigrisnya Babylonia di Timur Tengah.

Tentu disana tempat subur nyatanya sekarang hampir semua lahan menjadi sawah.

Disitujuga dahulunya tempat pertemuan dua jalan yaitu jalan dari Koto Panjang dan Jalan dari Tanjung Kandis. Tempat itu persimpangan dan pertemuan, karena itu nenek moyang Taluk memilih tempat itu sebagai pusat Pemerintahan Nagari

Pada zaman Rimbo Apa ini Taluk diakui sebagai sebuah nagari oleh Sungai Pagu. Sungai pagu ketika itu mendapat limpahan wewenang dari pagaruyung untuk mengurus nagari – nagari di banda X. Bukan banda X saja, bahkan semua daerah yang jauh letaknya dari pagaruyung diserahkan kepad sungai pagu daerah jauh itu disebut Rantau.

BENTUK PEMERINTAHAN NAGARI

MASA RIMBO APA

Kepala Pemerintahan di pegang oleh seorang yang bergelar PAMUNCAK, beliau dipilih oleh Kerapatan Adat di hadir para penghulu. Penghulu anya 4 orang saja, keempat penghulu tadi membantu Pamuncak, Pemuncak langsung bertanggung jawab kepaada penguasa Sungai Pagu.

Untuk mengurus pemerintahan Nagari Taluk di apa di bangun di balai sebanyak dua Buah. Satu untuk tempat berunding (Balai) dan satunya lagi Kantor Pamuncak. Disana segala pendapat ditempa karena itu disebut Apa. Kata ini diambil dari pandai besi.

Menurut Idrus Dt. Rajo Bandaro (Tgl 15 – 2 – 1962) sejak aman Apa sampai dengan Tahun 1914, di Taluk dikenal empat orang penghulu dengan sebutan Pangulu Nan Barampek. Mereka pembantu Pamuncak untuk pelaksanaan Pemerintah. Pangulu Nan Barampek yang berunding di Apa bersam Pamuncak.

Suku ketika itu belum terbagi seperti sekarang memang suku – suku sebenarnya dari tempat asal telah terbagi seperti Kampai, ada Kampai Nyiur Gading, Kampai Tengah dan Kampai Sawah Laweh . namun karena etika itu kaum di Taluk masih sedikit

semua Kampai di satukan saja begitu uga dengan Panai, Sikumbang dan Melayu.

Pangulu Nan Barampek itu terdiri dari :

1. Utusan Kampai Nan Tigo Lambang, terdiri dari Kampai Tengah (Rajo Bandaro), Kampai Sawah Laweh (Lambuik Kayo), dan Kampai Nyiur Gading (Raji Bagindo).
2. Utusan melayu Nan Ampek Nyinyiak terdiri dari Melayu Durian (Tan Larangan), Melayu Tengah (Tambarain) dan Melayu Koto Kacik Bandari Sati. Yang satu lagi tak tersebutkan mungkin bergabung dengan yang lain.
3. Utusan Panai Nan Tigoo Ibu terdiri dari Panai Ludang (Mangkudun), Panai Tengah (Rajo Alam), Panai Tanjung (Rajo Batuah)
4. Utusan Nan Tigo Lareh terdiri dari Sikumbang Malin Mansiang (Rajo Kayo), Sikumbang Gadang Rajo (Malenggang), Caniago (Rajo Gamunyang) dan Jambak (Bandaro Sutan)

LEGENDA MALIN DEMAN

Pada maso apa dipertemukan dua sungai di apa hidup keluarga suku kampai sungai koto panjang lah yang jernih airnya karena itu di muaro sungai koto panjang ada tepian tepat mandi di situlah para perempuan mandi, memcuci dan mengambil air setiap pagi dan petang

Pada suatu hari ada upacara turun mandi seorang anak bernama Malin Dema. Ketiga bayi Malin Deman di mandikan selembat rambut panjang membalut kepalanya, orang bertanya – tanya rambut rambut siapa gerangan dan rambut itu di simpan oleh ibu malin deman.

Setelah beranjak dewasa ibunya memberikan rambut itu kepada malin deman, sejak hari itu Malain Deman Rindu ingin bertemu dengan si empunya rambut ai sering malalang ke koto panjang sebagai hulu dari sungai Rimbo Apa.

Akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa di hulu sungai koto panjang tempat kampung lama Pancuran Tujuh, sering putri Tujuh turun mandi ke

kolom pincuran tersebut di sanah ada mande Rupiah merupakan tempat mengaduh putri Tujh jika sedang berada di mungka bumi.

Ketika putri tujuh sedang mandi malin mengitip ke pincuran tujuh melihat putri nan tujuh sedang mandi – mandi. Dari yang tujuh dia melihat seorang yang bungsu adalah yang paling cocok sebagai pemilik rambut. Malain mengambil pakain terbang yang di sebut pakain sonsongan Barat milik Putri Bungsu. kemudian di bawah pulang kerumah mande. Putri bungsu di tingal sama kakaknya mereka telah terbang kembali ke langit, sedangkan puri bungsu tinggal dan mengaduh kepada mande Ruba , mande memperkenalkan Malin kepad Putri dan ahirnya mereka menikah dan mempunyai satu orang anak yang bernama Malin Duano. songsong Barat di kembalikan lagi kepada Putri bungsu dan kembali kelangit

Dipersingkat ceria sampainya di kampung koto panjang ada kuda malin deman manjadi batu sampai saat sekarang menjadi sejarah bahwasanya Pincuran Tujuh dan Batu Kudo yang ada di Koto Panjang adalah memiliki Sejarah Jaman dulunya

ZAMAN PAMUNCAK

(1800 – 1914)

a. Keadaan Alam taluk

Sungai di abalai lamo makin mendangkal perahu tidak lagi dapat berlabuh dekat pasar . dimuaro terjadi Delat menutup pitu kelaut. Dari padang orang menaiki Bukit Gelangang Ruan di selatan Padang menuju Tarusan dari Tarusan menyusur pantai ke painan. Dari painan lewat pencoran Boga manaiki dan memotong Bukit Batu Bawak menuju sungai Nipa terus ke kuok

b. Jembatan dan lalulintas

Jalan dari Tanjung kandis dan dari Koto Panjang ketika itu bertemu di Rmbo Apa kemudain hanya ada satu jembatan untuk menyebrang ke koto keduduk.

Jalan ke ujung Batu semula adalah dari ujung Tanah (Kampung jambak) menuju Kampung sawah terus ujung Batu

c. Keunikan Pasar Taluk

Setelah balai lamo pasar pindah ke pasar sekarang (sekita 1880) namun belum satu pun los atau bangunan lain berdiri secara permanen. Orang berjualan di bawahnya Pohon Lansano ada 14 pohon mengelilingi pasar.

Konon, menurut kepercayaan orang waktu itu yang datang berbelanja itu orang bunian orangnya tidak kelihatan. Pernyataan kita mereka berbelanja apa dan membeli dari siapa dan siapa yang menjual.

d. Mesjid dagang

Orang sudah mulia banyak melewati jalan Darat di samping jalur laut, oleh pemerintahan kolonial jalan tikus dilebarkan sehingga pedati untuk beberapa pegal jalan sudah sudah mulai digunakan. Untuk menampung anak dagang dalam perjalanan di bangun mesjid di pingir sungai air pasang itulah mesjid di air pasang sekarang.

e. Kedudukan pasar

Pasar belum sederajat dengan Kot dalam administrasi pemerintahan ketika itu ada Koto, yaitu Koto Panjang, Koto Keduduk dan Koto Kandis sedangkan Uba Taluk dan Tanjung Durian.

f. Mesjid Raya Taluk

Jauh sebelum mesjid Dagang dekat air pasang di bangun mesjid Raya Taluk di koto keduduk telah ada, belum ada orang Tua Taluk yang dapat memperkirakan bila mana mesjid Raya itu di bangun antara abad 17 dan abad 18. Orang tua Taluk hanya bisa menjelaskan bahwa mesjid itu rehab oleh Muncak Kidam pada masa pemerintahannya.

g. Bentuk Pemerintahan

Semasa muncak

Demikianlah suasana Taluk seperti yang di jelaskanya di atas tadi, ketika akan memasuki masa pemerintahan Pamuncak, yang merupakan awal. Jauh sebelum masjid Dagang dekat air pasang dibangun, mesjid Raya Taluk di Koto Keduduk telah ada sebelum

ada orang Tua Taluk yang dapat memperkirakan bilaman masjid Raya itu di bangun

h. Bentuk Pemerintahan

Semasa Pamuncak

Ketika akan memasuki masa pemerintahan Pamuncak yang merupakan awal dari pemerintahan kolonial Belanda sebagai penerus kekuasaan VOC. Sejak VOC bubar karena korupsi pada tahun 1779 Pemerintahan Kolonial Belanda yang diurus dari Negeri Belanda diErapa.

URUTAN NAMA – NAMA PAMUNCAK DI TALUK

PAMUNCAK KAJO IMA

1840 – 1860

Pamuncak ini di perkirakan memerintah di Taluk antara tahun 1840 – 1860 hal ini dihitung – hitung berdasarkan jumlah generasi oleh Ayek Imam Badak.

MUNCAK TABUH TUAH TAN MAJALELO

ALIAS MUNCAK DI PARID

1860 – 1889

Masih keterangan dari ayek Imam Badak Muncak Tabuh Tuah Tan Majo Lelo, seperti nama” Tuah “ memang pemberani orang segan kepadanya. Muncak yang berasal dari suku sikumbang ini bergelar pula muncak di parit nama itu ada sebabnya.

Pada masa pemerintahan beliau itu pasar yang masih berupa lapangan berumput di bawah teduhan pohon lansano itu, sering digenagi banjir yang mengalir dari Rimbo apa.

MUNCAK KIDAM 1889 - 1899

Muncak Kidam di jelaskan ole ayek kali Imam Pasa kata beliau Muncak Kidam mulai memerintah 6 Tahun sesudah Gunung Karakatau meletus. Kalau menurut bahasa Ayek Kali Enam tahun sesudah galoro naik. Dengan demikian kita dapat memperhitungkan yaitu 6 taun sesudah tahun 1883 jadi muncak Kidam mulai memerintah pada Tahun 1889.

Ayek Kidam Imam Pasa mengatakan bahwa Muncak Kidam itu mempunyai Kuda Hitam sebagai kendaraan dinas dan istri belia Dua, yang satu di ujung Batu

MUNCAK NAHU RAJO KAYO (1891 - 1900)

Muncak ini dipilih segera sebagai pengganti Muncak Matan, Muncak Nahu dari Suku Sikumbang perhatiannya lebih banyak ke agama. Surau Suluk di Tanjung Kandis dimajukan masjid Raya Koto keduduk yang masih beratap rumbia beliau ganti denga atap ijuk. Karena perhatian beliau lebih banyak kepada Tasauf.

MUNCAK KANIT SAMPONO BATUA (1900 - 1907)

Muncak pengganti muncak Nahu ini berasal dari suku Kampai Nyiur Gading beliau yang mengganti atap ijuk Masjid Raya Koto Keduduk dengan atap seng. Pada masa itu jalan kecil menghubungi padang dengan banda X mulai ada namun mobil belum masuk. Perdagangan lewat darat mulai mengeser perdagangan melalui laut akibatnya muara atau pelabuhan yang selama ini ramai dikunjungi sekarang mulai sepi.

MUNCAK JAMIL PANDUKO RAJO (1907 - 1914)

Orang mengelari beliau Muncak Lunce karena pada masa beliaulah berakhir semua jabatan muncak. Sudah terluncur tidak di pakai lagi ada nama baru sebagai pengganti gelar muncak yaitu Penghulu Kepala (Angku Palo). Ketika itu ada pembaruan Pemerintahan Belanda hendak melaksanakan Politik Etis, atau Politik Balas Jasa, padahal semua itu adalah tipu muslihat Belanda semua gerakan itu sebenarnya untuk kepentingan kaum kapitalis Belandayang hendak masuk ke indonesia

Nagari Pulang ke Adat

Diminang kabau di kampanyekan Nagari pulang ke Adat artinya yang memerintah di Nagari Kaum Adat. Orang minang sangat gembira terutam kaum adat atau Para penghulu sebab penghulu akan memerintah sendiri kemenakanya dan salah seorang dari penghulu akan menjadi penghulu kepala penghulu kepala ini akan memerintah Nagari Belanda

katanya hanya pelindungan dan penjaga keamanan. Jabatan diatas Penghulu Kepala diangkat seorang Demang juga berasal salah seorang Datuak diantara Penghulu kepala tadi namanya Deang Adat.

MASA PEMERINTAHAN

WALI NAGARI M. JINIR

1976 – 1982

Let Pol M. Jinir meneruskan dan menyempurnakan resetlemen pembaruan tempat tinggal pasir Indah harapan. Jalan – jalan dibuat pengavling dijalankan teru dan penduduk mulai membangun rumah dan menghuninya. Bayangan pantai pasir yang menakutkan karena kepercayaan adanya jin lawik yang mengangu, makain menipis maka penduduk makainramai menepatinya.

Disamping itu Wali Nagari berhasil memperkecil atau menekan budaya judi di taluk suatu pemandangan yang sangat menyedihkan kalau beberapa lapau berubah fungsi menjadi tempat perjudian. Wali Nagari Jinir berhasil “ mensunykikan “ perjudian dalam masa pemerintahanya

MASA PEMERINTAHAN

WALI NAGARI MAHRUS RAJO BANDARO

1982 – 1985

Pengembangan Kampung Pasir

Pada waktu itu perkampungan di pasir sudah merata didiami penduduk yang pindah dari berbagai kota seperti disebut diatas, bukan pasir saja menjadi sasaran tempat tinggala baru penduduk Taluk juga Rimbo Tengah, Ujung Au, Limpaso dan sepanjang jalan Raya.

Dipasir dibuat jalan dan polongan dan penduduk mulai menanam kelapa pernah juga satu kali menanam jeruk, pasir merupakan wilayah paling enak untuk jeruk waktu itu dan pasir menjadi daya tarik untuk perbaikan ekonomi. Orang kadang – kadang menjual tanah perumahannya seperti di koto keduduk atau Koto panjang kemudian mengantinya dengan membeli tanah di pasir.

Kampung Uba di puncak Bukit, dipindahkan pertam memilih lokasi dekat mesjid Koto Keduduk. Kemudian setelah pasir dibuka dinyatakan

Kampung Uba. Sehingga ketika desa-desa dibentuk pada tahun 1991 Limpaso mempunyai nama baru yaitu Uba – Limpaso.

MASA PEMERINTAHAN
LET. POL M. JINIR KE 2
1985 -1990

Perhatian Wali Nagari kepada bidang pemasaran pasar menjadi sasaran di pasar banyak sekali kotoran binatang terutam jawi, pasar telah menjadi kandang jawi di malam hari wali nagari mulai menertipkan ternak.

Agar pasar di jga oleh banyak orang maka di sebagian sisi pasar dibuat kios seperti toko untuk disewakan kepada pedagang. Sasaranya adalah sisi utara dan sisi timur dan tanah pasar sebenarnya kearah ini telah dimulai juga oleh nagari sebelumnya.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2001, dimana Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Nagari. Maka Pemerintahan Desa kembali menjadi sebuah Nagari, melalui kesepakatan pemuka masyarakat dan KAN Nagari maka diangkat Bapak AFRIJON, SH menjadi Pejabat sementara Wali Nagari Taluk Tigo Sakato .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato, kemudian pada tanggal 8 Desember 2011 dilaksanakan Pemilihan Wali Nagari Devinitif. Berdasarkan surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 /455 /Kpts /BPT-PS /2011 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Se- Kecamatan Batang Kapas. Tanggal 28 Desember 2011 dilantiklah Wali Nagari terpilih yaitu Bapak EFRIADI, S.Ag sebagai Wali Nagari Taluk Tigo Sakato. Pada tanggal 28 Desember tahun 2017 berakhirilah masa jabatan Wali Nagari Tauk Tigo Sakato atas nama Bapak EFRIADI, S.Ag dan diserahkan terimakan jabatannya kepada PJS Bapak RAJA RATMAN, SE sampai saat ini. Demikianlah sejarah singkat terbentuknya Nagari TALUK Tigo Sakato

2. Demografi

1. Kondisi Umum Nagari Taluk Tigo Sakato

a. Keadaan Fisik/Geografis Naga

1. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : berbatas dengan Nagari Sungai Nyalo
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Nagari Koto Taratak
- Sebelah Barat : berbatas dengan Nagari Taluk
- Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Solok Selatan

2. Luas Wilayah

- Luas Wilayah 2.000 ha

1.. Areal Budi Daya

- a. Sawah beririgasi teknis -
- b. Sawah irigasi ½ Teknis 160 ha
- c. Sawah tadah hujan 72 ha
- d. Perkebunan 88 ha
- e. Kolam/tambak 0,6 ha
- f. dll

- 2. Areal Pemukiman 215 ha

- 3. Hutan Negara/ Hutan Lindung 3.558 ha

- 4. Hutan Rakyat 989 ha

5. Areal Sosial Budaya

- a. Pasar -
- b. jalan 10,2 ha
- c. Kantor/ sekolah 5 ha
- d Lapangan Olah raga 15 ha
- e. tempat ibadah 0,9 ha
- f. dll

- 6. Areal Peruntukan lahan 1 ha

3. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan topografi Nagari Taluk Tigo Sakato adalah merupakan daerah perbukitan/dataran tinggi daratan. Sedangkan Iklim Nagari Taluk Tigo Sakato sebagaimana Nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan

Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato kecamatan Batang kapas

4. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

Nagari	Kampung
1	2 (tiga) : 1. Kampung Koto Keduduk 2. Kampung Tanjung Kandis 3. Kampung Koto Panjang

3. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato adalah 571 KK dengan jumlah jiwa Sebanyak 2.565 jiwa terdiri dari laki-laki 1.225 orang dan perempuan sebanyak 1.340 Orang. Tingkat pendidikan cukup tinggi, rata-rata masyarakat tamatan SLTA dan banyak Yang tamatan Perguruan Tinggi. Jumlah sarana pendidikan formal adalah sebagai berikut:

1. SD / Sederajat : 3 Unit
2. SMP/ Sederajat : -
3. SMA/Sederajat : -

Bidang Keagamaan 1000 0/0 masyarakat Taluk Tigo Sakato menganut agama Islam dan toleransi sesama pemeluk pada kegiatan agama terbentuk majlis ta'lim pada Setiap Mesjid. Untuk pendidikan non formal bidang keagamaan masyarakat mempergunakan MDA/TPSA, sarana ibadah Mushalla dan Mesjid yang dibangun secara swadaya.

Masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato merupakan masyarakat homogen keturunan etnis Minangkabau, masyarakat masih memiliki kekerabatan yang kuat dan diatur di bawah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Perkembangan organisasi sosial kemasyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato berkembang dengan baik terlihat dengan banyaknya kelompok-kelompok budaya dan kesenian tradisional yang tumbuh di masing-masing kampung.

4. Keadaan Ekonomi

Pada bidang perekonomian pada umumnya masyarakat hidup sebagai petani dan buruh tani sebagian lagi bergerak di bidang perdagangan, jasa dan sebagai PNS. Usaha pertanian yang paling dominan adalah komoditi padi sawah dengan rata-rata usaha sawah 2 kali setahun dan tingkat produksi 5-5,5 ton/ ha. Usaha perkebunan adalah durian, gambir, karet dan sawit serta peternakan sapi. Usaha pertanian ini masih dikelola secara tradisional dan kurang intensif.

Pada tahun 2006 di Nagari Taluk Tigo Sakato masyarakat mulai gencar menanam tanaman karet, gambir, sawit dan sekarang telah berproduksi. Pada lahan lading (huma) disepanjang aliran sungai banyak di garap oleh masyarakat dengan tanaman Kacang, jagung, dan sayur-sayuran. Untuk lebih jelasnya mengenai ekonomi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

a). Jumlah Penduduk 571 KK dengan jumlah jiwa : 2.565 Jiwa

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.225	1.340	2.565

b). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : (dalam KK/jiwa)

Kaya	Sedang	Kurang Mampu
98 kk / jiwa	272 kk / jiwa	201 kk / jiwa

c). Tingkat Pendidikan

Tdk Tamat SD	SD	SMP	SLTA	Sarjana
75	259	293	358	102

d). Mata Pencaharian

Karena Nagari Taluk Tigo Sakato. merupakan Daerah Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Usia Produktif	686 jiwa
Usia Non Produktif	1.860 jiwa

e). Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Nagari Taluk Tigo Sakato sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah dan perkebunan, sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

f). Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato berjumlah 13.280 ekor terdiri dari kerbau, sapi, kambing dan ayam / itik.

g). Jenis dan luas peruntukan Lahan

NO	PERUNTUKAN LAHAN	LUAS (Ha)	KET
1	Areal Budi daya		
	a. Sawah beririgasi Tekhnis	281	
	b. Sawah irigasi ½ teknis	36	
	c. Sawah tadah hujan	60	
	d. Perkebunan/ lahan	727	
2	Areal Pemukiman	145	
3	Hutan Negara/ Hutan Lindung)	1.675	
4	Hutan Rakyat	255	

1.2.4. Struktur Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 hanya mengatur hal yang pokok-pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, sedangkan secara detail dan teknis diatur oleh Pemerintah Kabupaten dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki dan keanekaragaman serta spesifik Nagari yang bersangkutan.

Yang dimaksud pemerintahan Nagari dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah tetapi tidak lagi berada dibawah Camat karena Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu Pemerintah Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.

Dalam hal ini pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan

lembaga Adat Nagari/Kerapatan adat Nagari dan Lembaga Unsur lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

a) Penyelenggaraan Koordinasi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat melalui koordinasi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan pertimbangan masalah. Sebagaimana tahun sebelumnya koordinasi dengan pimpinan BAMUS Nagari dan Pimpinan Lembaga-lembaga Nagari, berjalan dengan baik. Koordinasi ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan.

Fenomena ini tercermin melalui kegiatan-kegiatan KeNagarian. Rapat koordinasi ini terutama membahas persoalan-persoalan aktual yang terjadi di Nagari meliputi masalah Ekonomi, Aset Nagari, Kependudukan, Sosial Budaya, dan Keamanan Ketertiban. Rumusan atau solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan kerja selanjutnya.

Untuk kegiatan-kegiatan koordinasi semakin dikembangkan ketingkat Kecamatan dan Kabupaten, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan, Kepala Dinas dan Instansi Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Batang Kapas, Wali Nagari, Pimpinan BAMUS Nagari, dan Pimpinan Lembaga-lembaga serta Unsur Nagari Taluk Tigo Sakato lainnya. Hal ini bertujuan untuk langkah awal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pendidikan, pembangunan, dan keamanan lingkungan.

b) Pembinaan Perangkat Nagari

Sesuai dengan Peran dan Fungsi Pemerintahan Nagari, telah dilaksanakan kegiatan melalui :

- a. Pembinaan Peningkatan Kemampuan Kaur dengan menjelaskan Tugas dan Fungsi.
- b. Pembinaan dan Peningkatan kemampuan Kepala-kepala Kampung melalui pertemuan-pertemuan.
- c. Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan kebersihan dengan melibatkan Kelompok-kelompok Pemuda kampung dan Karang Taruna

c) Pembinaan Keamanan, Ketentraman, Kebersihan & Ketertiban (K3)

Dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) Nagari Taluk Tigo Sakato, hal ini sangat membantu sekali dalam pengamanan ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat karena dengan adanya forum ini setiap permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus sampai ke meja hijau.

Adapun Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Penyelesaian persoalan yang menyangkut dengan tugas dan fungsi FKPM, antara lain menerima dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat menyangkut persoalan keamanan dan ketertiban pada tingkat Nagari.
 - b. Melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam membangkitkan semangat Gotong royong.
 - c. Pembinaan terhadap permasalahan dengan penyelesaiannya di tingkat Nagari sebelum ketingkat yang lebih tinggi.
- d) *Kegiatan Sekretaris Nagari*
- Program kerja Serkretaris Nagari Taluk Tigo Sakato secara garis besarnya adalah menjalankan tata pemerintahan yang baik, transparan, responsive, partisipatif, dan akuntabel serta pelayanan yang prima terhadap masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato.
- e) *Kegiatan Rapat-rapat*
- Dalam pemecahan segala permasalahan dan untuk menentukan langkah kebijaksanaan Nagari diadakanlah pertemuan serta rapat-rapat yang tujuan akhirnya agar permasalahan dapat terselesaikan berkat keputusan secara bersama.
- f) *Kependudukan*
- Untuk data kependudukan, karena ini sangat penting sekali kita telah mencoba mendata ulang penduduk Nagari Nagari Taluk Tigo Sakato dengan melibatkan kader-kader nagari. Untuk kedepannya kita berusaha mengolah data tersebut dengan sistim komputerisasi dengan harapan apapun bentuk data mengenai kependudukan dapat diakses lebih cepat dan tepat.

1.2.5. Kelembagaan Nagari

Lembaga-lembaga yang ada di Nagari Nagari Taluk Tigo Sakato seperti BAMUS Nagari, LPMN, PKK, Bundo Kanduang, Pemuda, FKPM, kurang berjalan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing lembaga, sehingga kita masih harus memperkuat dan menjalin kerjasama dalam membantu kelancaran pelaksanaan Pembangunan di Nagari Taluk Tigo Sakato, adapun struktur pengurus dari lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut

a) Pemerintahan Nagari

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	NOFRIANDI	Wali Nagari	SLTA
2	ILNASDI	Sekretaris Nagari	SMEA
3	MASRIL	Kaur. Pemerintahan	SLTA
4	ARMAYENTI	Kasi Kesra	SMEA
5	ZARLIA MIZA, S.TP	Kaur Perencanaan dan Keuangan	S.I
6	SUSTRY ANDAMI, SPd.I	Kaur Tata Usaha dan Umum	S.I
7	ERLIANIS	Kaur Keuangan	SMEA
8	SYAFRIANDI	Kepala Kampung Koto Keduduk	SLTA
9	YULKISMAN	Kepala Kampung Tanjung Kandis	SLTA
10	BUSRIWANDRI	Kepala Kampung Koto Panjang	SLTA
11	NORA MARDANI, ST	Staf	S.I
12	MITA SAFITRI, S.Pd	Staf	S.I
13	MESI ARYANI, S.Pd	Staf	S.I

b) Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI)

BAMUS NAGARI yang merupakan komponen Pemerintahan Nagari, senantiasa mengupayakan terciptanya suasana yang kondusif guna mendukung terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Nagari dengan baik, serta merangsang tumbuh dan berkembangnya kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan Nagari.

Selama Tahun 2018 BAMUS telah menunjukkan kinerja yang baik disamping mampu menjembatani pihak eksekutif, masyarakat dan memberikan pengertian serta penjelasan program Nagari.

Struktur pengurus dari BAMUS NAGARI adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	NASIR	Ketua	SLTA
2	UMAR P.BANDARO SUTAN	Wakil Ketua	SLTA
3	KH. DELIS	Sekretaris	SLTA
4	SANTI DEWI	Anggota	SLTA
5	DAVITSON	Anggota	SLTA

c) *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)*

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	ZAINAL L. KAYO	Ketua Umum	SLTA
2	SYAFRIL	Ketua I	SLTP
3	ASRIL M	Ketua II	SLTP
4	SUARDI, AR	Sekretaris	SLTP
5	ELI MARNI	Bendahara	SLTA
6	ABU BAKAR	Seksi Agama	SLTP
7	IM. BASRI	Seksi Adat Budaya	SLTP
8	HERIFESNI, A.MD	Seksi Kesehatan	D III
9	WINDA ZULDAWATI,S Pd	Seksi Pendidikan	S 1
10	NARIS	Seksi Perekonomian	SLTP
11	RISMAN SAID	Seksi Sarana Prasarana Fisik	S 1
12	KARDION	Seksi Olah Raga dan Generasi Muda	SLTA
13	WENDRA	Seksi ketentraman dan ketertiban	SLTP
14	YURNELI	Seksi Lingkungan Hidup	SLTA
15	RAHMA YULELNI	Seksi PKK	SLTA

d) *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*

Sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, dimana telah dilaksanakan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang no. 22 tahun 1999 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1984 tentang pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang pedoman umum gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, maju, mandiri hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi oleh keimanan dan ketagwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran gerakan PKK Nagari Taluk Tigo Sakato adalah keluarga yang ada di Kampung-kampung dalam Nagari Taluk Tigo Sakato, melalui bermacam-macam kegiatan yang tercakup dalam sepuluh program pokok PKK disesuaikan dan dilaksanakan oleh 4 Pokja. Yang dirasakan dalam setiap pertemuan yaitu, minimnya pengetahuan para ibu-ibu baik sebagai peserta maupun pembinaan dari Nagari, sehingganya kami mendatangkan nara sumber dari Kecamatan dan Kabupaten

Adapun struktur kelembagaan dari PKK adalah sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	Ny. MELLYA SAPUTRI	Ketua Umum	SLTA
2	MIMI ARIANTI	Wakil Ketua	SLTA
3	SUTRY ANDAMI	Sekretaris	SLTA
4	ERMAYENTI	Bendahara	SLTP
5	FARIDA ARIYANI,SPd	Ketua Pokja I	SLTA
6	SUTRI DEWI	Wakil Ketua	SLTA
7	NURLELA	Sekretaris	SLTA
8	ROS	Anggota	SLTA
9	EMI DARTI	Anggota	SLTA
10	ROSMIANA	Anggota	SLTA
11	NURSIDA	Ketua Pokja II	SLTA
12	SANTI DEWI	Wakil Ketua	SLTA
13	SAMSUARTI	Sekretaris	SLTA
14	ELI MARNI	Anggota	SLTA
15	YULIA	Anggota	SLTA
16	ROTNIDA	Anggota	SLTA
17	ELVA REZI	Ketua Pokja III	SLTA
18	TINA	Wakil Ketua	SLTA
19	IDASNI	Sekretaris	SLTA
20	NENENG SURYANI	Anggota	SLTA
21	JAMINAR	Anggota	SLTA
22	JAWANIS	Anggota	SLTA
23	RAHMAYULELNI	Ketua Pokja IV	D III
24	NINING SATRIA	Wakil Ketua	D III
25	YURNELI	Sekretaris	SLTA
26	HERI PESNI	Anggota	D III
27	RESMA YUNITA	Anggota	D III
28	YUL	Anggota	SLTA

a. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagari Taluk Tigo Sakato, belum ada perubahan sehingga masih terdapat personil lama, meskipun sudah ada perubahan posisi dari setiap orangnya seperti wakil Ketua yang dari unsur Babinkamtibmas sudah pindah tugas. Demikian juga personil lainnya.

Ketua	:	ASRILSAID
Wk. Ketua	:	Briptu . REFFI (Babin Kantibmas Nagari Taluk Tigo Sakato)
Sekretaris	:	SUARDI,AR
Wk. Sekretaris	:	ARPENDI
Bendahara	:	ROSPIDA
Anggota	:	1. Deprizal 2. Paryono 3. Usman 4. Ipel 5. Erlinda 6. Ilnasdi 7. Nasir 8. Syafriandi 9. Yulkisman 10. Busriwandri 11. Irma dewi 12. Defriwal 13. Ermayenti 14. Asril, M 15. Riri Muspaleni, S.Pd

PERATURAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO TAHUN 2019

1. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato No. 01 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2018.
2. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato No. 02 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019.
3. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018.
4. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato No. 04 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan JangkaMnengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2018 -2024 .

5. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato No. 05 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO TAHUN 2019

1. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato No. 800 / 01 / KPTS/WN-TTS/I-2018 , tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Taluk Tigo Sakato..
2. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/02/KPTS/WN-TTS/I-2018 Tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Staf Perangkat Nagari Taluk Tigo Sakato .
3. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor :800/03/KPTS/WN-TTS/I-2018 Tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Staf Perangkat Nagari TalukTigo Sakato
4. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/04/KPTS/WN-TTS/I-2018 Tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Staf Nagari Taluk Tigo Sakato.
5. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/05/KPTS/WN-TTS/-2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato
6. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/06/KPTS/WN-TTS/I-2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)Nagari Taluk Tigo Sakato.
7. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor ; 7/ KPTS/WN-TTS/I-2019 Tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan Tim Pembina /Pokja /Kader Pos Yandu Pelayan Terpadu (Pos Yandu) Nagari Taluk Tigo Sakato.
8. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/8/kpts/WN-TTS/I-2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Pengangkatan Guru TK – PAUD DAN MDA TUNAS HARAPAN Kampung Koto Keduduk
9. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/9/KPTS/WN-TTS/I-2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKB) dan SUB PPKBD Nagari Taluk Tigo Sakato.
10. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/10/KPTS/WN-TTS/I-2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Susunan Kepengurusan Mesjid /Mushallah danGuru TPA/TPSA Sekenagarian Taluk Tigo Sakato.

11. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/11/KPTS/WN-TTS/I-2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan Petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) Pada Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN)
12. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 12/KPTS/WN-TTS/I-2019 tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan Pengurus Seni Budaya / Randai Kampung Koto Keduduk Nagari Taluk Tigo Sakato.
13. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 13/KPTS/WN-TTS/III-2018 Tanggal 9 Maret 2019 tentang Penugasan Perangkat Nagari Taluk Tigo Sakato sebagai Sekretariat Pemungutan Suara.
14. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor: 14/KPTS/WN-TTS/V-2018 Tanggal 20 Mei 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Nagari Taluk Tigo Sakato
15. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato 15/KPTS/WN-TTS/V-2018 Tanggal 20 Mei 2018 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Taluk Tigo Sakato
16. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 16/KPTS/WN-TTS/V-2018 Tanggal 26 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Pemungutan PBB. P2 Tahun 2018 Nagari Taluk Tigo Sakato.
17. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 17/KPTS/WN-TTS/VII-2018 Tanggal 1 Juli 2018 tentang Susunan Pengurus Mesjid Al Mukminin Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluk Tigo Sakato
18. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 18 /KPTS / WN-TTS/VII-2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Harapan Sejahtera Keluarga Miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni
19. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 19 /KPTS / WN-TTS/VII-2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Penetapan Pengurus Kolomlkan Putih Bungsu dan Pincuran Tujuh Nagari Taluk Tigo Sakato.
20. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 20/KPTS/WN-TTS/VII-2018 Tanggal 20 Juli 2018 tentang Penetapan Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2018 -2024.
21. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 21/KPTS/WN-TTS/VII-2018 Tanggal 20 Juli 2018 tentang Pengangkatan Tim Verifikasi Usulan atau Kegiatan Nagari Taluk Tigo Sakato.

22. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/22/KPTS/WN-TTS/VIII-2018 Tanggal 4 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Staf Nagari Taluk Tigo Sakato
23. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor: 23/KPTS/WN-TTS/IX-2018 Tanggal 3 September 2018 tentang PenetapanPengurus Kelompok Tani Perkebunan Gambir Harapan Nagari Taluk Tigo Sakato.
24. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor: 22/KPTS/WN-TTS/-2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Taluk Tigo Sakto.
25. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 23/KPTS/WN-TTS/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Delegasi Nagari Taluk Tigo Sakato untuk Kerjasama Antar Nagari.
26. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 24/KPTS/WN-TTS/2018 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serat perpanjangan masa Jabatan Sekretariat Pemungutan Suara Pemilu Nagari Taluk Tigo Sakato
27. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 25/KPTS/WN-TTS/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Taluk Tigo Sakato.

KEPUTUSAN BAMUS NAGARI TALUK TIGOSAKATO TAHUN 2019

1. Keputusan BAMUS Nomor 01 /KPTS.BAMUS.NAG./2018 Tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018
2. Keputusan BAMUS Nomor 02 / Kpts -BAMUS - NAG / 2018 Tanggal 30 September 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato
3. Keputusan BAMUS Nomor 3 / Kpts- BAMUS- NAG/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

2.1. VISI DAN MISI

Pelaksanaan kegiatan kegiatan dan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato dalam tahun 2018 yang dituangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nagari Taluk Tigo Sakato tahun 2018, dan telah menyusun RPJM untuk Tahun 2018-2024

Adapun Visi Nagari Taluk Tigo Sakato dalam RPJM tahun 2018-2024 tersebut adalah sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TALUK TIGO SAKATO YANG MAJU SEJAHTERA DAN AGAMAIS"

Misi Nagari Taluk Tigo Sakato sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Nagari yang bersih, Transparan, Bebas dari Korupsi dan Bentuk penyelenggaraan lainnya
2. Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Prinsip 3SL (Senyum, Sambut dan Sapa)
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dalam segala bidang secara berkelanjutan

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN NAGARI

Strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan mewujudkan sarana dan prasarana terutama untuk pembangunan Kantor Wai Nagari.

2. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan, Seni Budaya dan Pendidikan
3. Mengadakan pelatihan - pelatihan kepada kelompok masyarakat untuk mengerakan potensi ekonomi masyarakat.
4. Mengaktifkan BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari)
5. Akan Melakukan Program Beda Rumah di setiap Kampung
6. Menumbuhkan semangat Gontong Royong dengan kegiatan "Jum'at bersih
7. Pembangunan Sarana Olah Raga di setiap Kampung
8. Pembangunan Infrastruktur Nagari yang berhubungan langsung dengan pusat Ekonomi masyarakat, Khususnya Pertanian dan Perkebunan
9. Mengembangkan Pariwisata yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato

2.2.1. BIDANG YANG TELAH DILAKSANAKAN

a. Bidang Keagamaan

1. meningkatnya Pembangunan Mesjid Ruhammah Koto Keduduk, Mesjid Al Mukminin Tanjung Kandis, Mesjid Taqwa Koto Panjang
2. Peningkatan pembangunan mushallah yang di nagari taluk tigo sakto

b) Bidang Pendidikan

1. mengoptimalkan Potensi Nagari
2. meningkatkan SDM Masyarakat melalui pelatihan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Paket B dan Paket C serta Pelatihan.
3. Peningkatan Kegiatan proses belajar mengajar TK dan PAUD
4. Membentuk Taman Pendidikan Al-Quran di setiap Kampung dalam Nagari Taluk Tigo Sakato.

c). Bidang Olah Raga dan Keagamaan

1. Pembinaan / Pelatihan di Bidang Seni Budaya (Pidato Adat, Randai, Debus, Silat Dll)
2. Meningkatkan Generasi Muda dalam Bidang Khantibmas.

3. Mengaktifkan kegiatan Ronda Malam.

d) Bidang Kesehatan.

1. Pengobatan Gartis Kepada masyarakat
2. Meningkatkan Kegiatan GERMAS, Penyuluhan Kesehatan
3. Meningkatkan Kegiatan Penjegahan Anak Kurang Gizi dalam rangka pencegahan Stunting
4. Meningkatkan Peran Kader Pos Yandu / KB, dll
5. Meningkatkan kegiatan Program Lansia
6. Pembarantasan Anjing Liar (Eliminasi)
7. Pencegahan DBD dengan Foging (Pengaspalan) serta pengurusan Saluran - saluran Air.

e) Bidang Ekonomi :

1. Melalui Kelompok – kelompok Tani Pertanian untuk meningkatkan Ekonomi rumah Tangga.
2. melalui Kelompok Tani Gambir
3. Melalui Kelompok Tani Ternak
4. Melalui Perdagangan dan Home Industri

f) Bidang Pemerintahan

melaksanakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Government) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta pelayanan yang Prima Trasparan, Responsive, Partisipatif dan Akuntibel kepada masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato.

2.3. PRIORITAS NAGARI

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Nagari Taluk Tigo Sakato serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka pembangunan Nagari Taluk Tigo Sakato tahun 2018 diorientasikan pada beberapa bidang, antara lain :

2.3.1. Bidang Keagamaan

1. Pembangunan Mesjid Ruhammah
2. Pembangunan Masjid Al -Mukmini

3. Pembangunan Masjid Taqwa
4. Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah
5. Pembangunan Mushalla AL Itiqomah
6. Pembangunan Mushalla Nur Amal
7. Pembangunan Mushalla Darul Amal
8. Pembangunan Mushalla Al Qaumi
9. Pembangunan Mushalla Darul Jadid
10. Pembangunan Mushalla Al Ikhlas

Pembangunan bidang keagamaan lebih banyak dalam peningkatan sarana rumah ibadah dan juga melakukan kegiatan wirid dan didikan subuh untuk anak didik MDA / TPSA yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato.

2.3.2. Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah telah mengupayakan dan merealisasikan Honor Guru MDA dan TK – PAUD di Nagari Taluk Tigo Sakato, karena menyamai pendidikan merupakan menuai hasilnya di kemudian hari.

Dalam peningkatan mutu pendidikan Nagari Taluk Tigo Sakato telah didukung dengan sarana pendidikan seperti MDA, PAUD, TK, dan SD

Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas di bidang Pendidikan antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi Nagari
2. Melakukan pelatihan dengan mamfaatkan Dana Desa;
4. Meningkatkan SDM Masyarakat melalui Pendidikan Formal antara lain dengan memanfaatkan sarana Pendidikan yang ada yaitu:

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH GURU		JUMLAH PEGAWAI	
			PNS	HONOR	PNS	HONOR
1	SD NO. 32	101	9	1	-	2
2	SD NO. 18	106	6	6	-	1
3	SD NO. 15	44	5	2	-	1

2.3.3. Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Keamanan

1. Meningkatkan sarana Prasarana Olah Raga di setiap Kampung
2. Melaksanakan Latihan Volly Bal, Bola Kaki dan mengadakan Turnamen Bola Volly yang di selenggarakan oleh Nagari.
3. Meningkatkan PeransFKPM dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang muncul dalam masyarakat.
4. Mengaktifkan kegiatan ronda malam

2.3.4. Bidang Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan atau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia, untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam hal aparatur pemerintahan baik dari pusat sampai Nagari dan terutama sekali dukungan berupa peran serta aktif dari masyarakat. Salah satu perogram ini adalah

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik akan membawa pengaruh positif bagi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Beranjak dari hal diatas berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Nagari Taluk Tigo Sakato dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Taluk Tigo Sakato

NO.	KAMPUNG	SARANA / PRASARANA				
		PUSKESMAS / PUSTU	POSKESRI	POSYANDU	PRAKTEK DOKTER	PRAKTEK BIDAN
1	Koto Keduduk	-	✓	✓	-	-
2	Tanjung Kandis	-	✓	✓	-	-
3	Koto Panjang	-	✓	✓	-	-

Sumber : Data Nagari Taluk Tigo Sakato

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato boleh dikatakan telah mencukupi kebutuhan dalam hal jumlah dan pada saat ini Nagari Taluk Tigo Sakato juga telah dilengkapi dengan Mobil Ambulance milik Nagari namun sarana yang ada belum dilengkapi jumlah tenaga kesehatan yang cukup dan fasilitas / peralatan yang memadai.

Posyandu

Selain sarana kesehatan berupa puskesmas Nagari Taluk Tigo Sakato juga memiliki sarana posyandu sebanyak 4 unit yang tersebar di 3 Kampung. Posyandu yang ada telah memiliki kader aktif sebanyak 20 orang. Aktifitas Yandu telah di laksanakan di Pos Yandu yang di bangun dengan Dana Desa di Masing Masing Kampung dan tidak lagi menggunakan Rumah Masyarakat atau tempat lain.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan melalui posyandu ini masih cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah balita yang datang untuk ditimbang setiap bulannya yang mencapai 100 %.

Tabel posyandu

No	Nama Posyandu	Nama Kader	Lokasi/ Kampung	Ket
1	BONSAI I	NENENG SURYANI	TANJUNG KANDIS	
2	BONSAI II	RAHMA YULELNI	KOTO KEDUDUK	
3	BONSAI III	NOVA SUSRAYANA	KOTO PANJANG	
4	BONSAI IV	TASWA NIARTI	TANJUNG KANDIS	

Selain Yandu Nagari Taluk Tigo Sakato juga telah aktif dalam pencegahan Stunting dan telah memiliki Kader Stunting

Tabel Kader Stunting

No	Nama Kader	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1	WANDA OKTASARI	PEREMPUAN	KOTO KEDUDUK	
2	DEVI	PEREMPUAN	KOTO PANJANG	

Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan perwujudan lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan masalah kesehatan, terutama sekali dari ancaman penyakit menular.

Tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan lingkungan di Nagari Taluk Tigo Sakato, sudah cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari sebahagian besar rumah telah memiliki sarana air bersih dan WC serat Nagari Taluk Tigo Sakato juga telah memiliki Program Sani Tasi Bantuan dari Dana DAK sebagai penunjang kesehatan lingkungan. Namun untuk pembuangan sampah masih belum memadai mengingat masyarakat banyak membuang sampah ke belakang rumah dan sungai, sebab Nagari Taluk Tigo Sakato berada sepanjang Aliran sungai. Adapun kegiatan kesehatan lingkungan yang telah dilakukan antara lain :

1. Pengobatan gratis untuk masyarakat
2. Pemberantasan anjing liar (eliminasi)
3. Pencegahan DBD serta pengurusan Saluran - saluran Air
3. Meningkatkan peran kader posyandu/KB

2.3.5. Bidang Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis Nagari merupakan salah satu rencana strategis pembangunan di Nagari Taluk Tigo Sakato. Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato senantiasa tetap berusaha mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi guna mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan tercapai dengan cara melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan

ekonomi yang terutama Pertanian, perkebunan, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi /Kelompok SPP melalui sistim ekonomi kerakyatan yang tertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri.

Dalam menunjang ekonomi masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato tersedia lembaga-lembaga keuangan sebagai berikut :

No	Nama Lembaga Keuangan	Lokasi/ Kampung	Ket
1	2	3	4
1	Lembaga Keuangan Masyarakat (LKMA)	1 unit /Koto keduduk	Aktif

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di Nagari Taluk Tigo Sakato adalah sebagai berikut :

1. Melalui Kelompok-Kelompok Tani Pertanian untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga
2. Melalui Kelompok Tani Perkebunan
3. Melalui Kelompok Tani Ternak
4. Melalui Perdagangan dan Home Industri
5. Melalui Kelompok – kelompok SPP yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato

Adapun pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada di Nagari seperti Ekonomi Mikro, dan juga bantuan pinjaman permodalan yang diberikan oleh LKMA melalui Kelompok-Kelompok SPP yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu pada tahun 2016 Nagari Taluk Tigo Sakato juga sudah mendirikan BUMNAG dan telah beroperasi di tahun 2018 dengan bantuan modal sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di anggarkan dari Dana Desa tahun 2017.

2.3.6. Bidang Pemerintahan

Melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good goverment) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment) serta pelayanan yang prima, transparan, responsive, partisipatif dan akuntabel kepada masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa atau sebutan lainnya (Nagari). Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN NAGARI

Kebijakan Umum dalam pengelolaan pendapatan nagari disepakati dengan BAMUS Nagari dengan menyusun Rancangan Anggaran Pembelajaan Nagari (APB Nagari) dan selanjutnya APB Nagari tersebut di sahkan oleh BAMUS dengan dikuatkannya berupa sebuah Pernag.

3.1.1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi

Pengertian dari *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* secara umum dapat diuraikan sebagai berikut ini :

- a. *Intensifikasi* adalah suatu usaha untuk menaikkan hasil pertanian tanpa menambah areal lahan pertanian, caranya antara lain dengan pemilihan bibit unggul, pemupukan, irigasi yang baik, mencegah penyerangan hama dsb. Pengertian lain tentang *intensifikasi* adalah merupakan usaha peningkatan produktivitas tenaga kerja dan sumberdaya alam serta upaya peningkatan keunggulan daya saing dengan penerapan iptek dan sarana produksi yang efisien.
- b. *Ekstensifikasi* dalam pemerintahan terkait dengan meningkatkan efesiensi (waktu, tenaga, dan biaya) kinerja Birokrasi (Layanan Publik) yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan.

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan nagari dengan menerapkan sistim *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* diharapkan dapat memberikan perubahan dalam kehidupan pada masyarakat di Nagari Taluk Tigo Sakato.

Dalam menerapkan sistim *intensifikasi* di Nagari Taluk Tigo Sakato telah dicoba diberbagai sector antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pendidikan yaitu dengan

memberikan bantuan-bantuan seperti pengadaan bibit unggul dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada sistim ekstensifikasi, Pemerintahan Nagari telah berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang ada dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Nagari.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya walaupun system pembagian pengembalian hasil pajak PBB ke Nagari melalui DAUN dan program-program pembangunan yang dibiayai APBD II, serta penggalan potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru (Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat) sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan Nagari

3.1.2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Dengan diterapkannya pola dari sistim tersebut diatas diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato baik dari segi perekonomian maupun peningkatan pengetahuan masyarakat guna mengurangi keluarga miskin di Nagari Taluk Tigo Sakato.

3.1.2.1. Pendapatan Nagari

Sumber Pendapatan Nagari terdiri dari Pendapatan Asli Nagari, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan Pusat, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	TARGET (Anggaran)	REALISASI	Ket
1.	Pendapatan Asli Nagari	1.500.000	1.500.000	
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.871.800,00	18.363,255	10.508.545
3.	Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N)	444.970.800,00	444.970.800,00	-
4.	Dana Desa/Nagari (DD/N)	718.822.000	691.887.099.61	26.934900.39
5.	Hibah	0	0	
6.	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
7.	Bantuan dari Provinsi	-	-	-
	JUMLAH	1.194.164.600,00,	1.156.721.154,61	

3.1.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang sangat dirasakan oleh Pemerintah Nagari adalah sulitnya mendapatkan sumber-sumber pendapatan bagi pemerintah nagari guna meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Nagari dalam rangka menunjang jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan.

Dalam tahun 2018 ini Pemerintahan Nagari telah berusaha untuk memfasilitasi dan mencari jalan keluar guna penyelesaian permasalahan tersebut diatas, antara lain dengan menerbitkan Peraturan Nagari Nomor : 04 Tahun 2018, tentang biaya legalisasi pelayanan surat menyurat di Nagari Taluk Tigo Sakato.

3.2. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari

Dalam pengelolaan keuangan Nagari, Pemerintahan Nagari telah melakukan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan di Nagari, dengan harapan kebijakan-kebijakan yang diambil dapat memberikan perubahan dan peningkatan pendapatan masyarakat, dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang sejahtera.

3.2.2. Target Dan Realisasi Belanja Nagari

Adapun Target dan Realisasi Belanja Nagari terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Rincian anggaran dan realisasi Belanja Nagari dari masing-masing jenis sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	TARGET (Anggaran)	REALISASI	Ket
1.	Belanja Pegawai	333.550.000,00	333.550.000.00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	241.451.134,23	233.595.771,39	
3.	Belanja Modal	616.668.889,89	616.668.889,89	
Total Pengelolaan Belanja Nagari		1.191.670.024,12	1,183.814.661,28	

3.2.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan dalam Pengelolaan Belanja Nagari pada tahun 2018 ini, tidaklah begitu menimbulkan permasalahan, dan telah diupayakan semaksimal mungkin oleh Pemerintahan Nagari untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

4.1. HAK ASAL USUL NAGARI

4.1.1. Program Dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan pemerintahan pada awal tahun 2018 pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sudah mulai senengi namun masih perlu pembenahan dan kelengkapan perangkat dan adapun hasil - hasil yang dicapai sbb :

a. Bidang Pemerintahan

Untuk kelancaran tugas di bidang Pemerintahan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, maka untuk tahun 2018 Dana Alokasi Pembangunan Nagari dialokasikan untuk Pembangunan Kantor Wali Nagari, Pengadaan mobiler Kantor Wali Nagari (Kursi Sekretaris dan Perangkat), Persiapan Lomba Nagari Tahun 2018, Lomba Taman Dasawisma Tingkat Nagari Taluk Tigo Sakato, Pelatihan Adat, Penghimpunan Data Profil Nagari dan Pendukung Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2018.

Semua hal tersebut dilakukan dengan tujuan demi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berurusan ke kantor Wali Nagari Taluk Tigo Sakato, serta kesiapan siagaan Nagari Taluk Tigo Sakato dalam menghadapi Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, dan menunjang pemanfaatan tanah pekarangan oleh masyarakat dengan melibatkan Tim Penggerak PKK Nagari, serta kesiapan Data Base Nagari dan kepedulian masyarakat dalam membangun nagari melalui kegiatan swadaya.

Kemudian dari pada itu dalam hal administrasi/surat menyurat, kami juga telah menginstruksikan kepada seluruh staf yang ada untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan nyaman berurusan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintahan Nagari dengan masyarakat.

b. Bidang Pembangunan

Dalam hal pembangunan untuk tahun 2018 ini, pembangunan dananya hanya berasal dari Dana Alokasi Pembangunan Nagari tahun 2018 yaitu :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA
1.	Rehab Kantor Wali Nagari	Rp. -
2.	Pengadaan Kursi Wali Nagari, Sekretaris dan Kaur	Rp. -
3.	Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Rp. -
4	Pelatihan Adat Istiadat	Rp. -
5	Pengimpunan Data ke Aplikasi Profil Nagari	Rp. -
6	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Rp. 2.000.000.-
	JUMLAH TOTAL DANA PEMBANGUNAN	Rp. 2.000.000.-

4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Semua Rencana kegiatan pembangunan untuk tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun pembangunan Kantor Wali Nagari Taluk Tigo Sakato dan Kantor BAMUS Nagari, PKK dan LPMN yang lebih presentatif belum dapat diwujudkan.

4.1.3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari Tahun 2018, Nagari telah membentuk Panitia yang terdiri dari :

1. Aparatur Nagari
2. Wali Kepala Kampung dan TPK Nagari.

4.1.4. Permasalahan Dan Penyelesaian

Pada awal-awal penyelenggaraan Pemerintah Nagari memang banyak menghadapi berbagai masalah dan hambatan, sehingga jalannya roda Pemerintahan terkadang belum memenuhi keinginan kita semua, bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Belum sepenuhnya potensi yang ada di Nagari dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda Pemerintahan Nagari.
2. Kurangnya keahlian dan kemampuan tenaga pengelola dalam menggali potensi yang ada.
3. Masih rendahnya tunjangan Aparat Nagari yang diberikan Pemda (di bawah UMR) sehingga Aparat Pemerintahan Nagari belum dapat bekerja dengan maksimal.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, yang terlihat dari masih kurangnya Nilai Swadaya dan partisipasi masyarakat

Untuk penyelesaian dari masalah yang timbul diatas, Pemerintah Nagari telah berusaha untuk memperkecil permasalahan yang timbul antara lain :

1. Bersama masyarakat mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki Nagari agar bermanfaat serta dapat memberikan dorongan untuk pergerakan roda Pemerintah Nagari.
2. Memberikan peluang dan kesempatan kepada Aparatur Nagari untuk menambah pengetahuan guna meningkatkan keahlian.
3. Memberikan penjelasan kepada Aparatur Nagari, bahwa tunjangan yang telah diterima adalah merupakan kemampuan Pemda dan berharap untuk masa yang akan datang tunjangan yang diterima akan ada perubahan.
4. Untuk menumbuhkan dan menciptakan partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Nagari berusaha melibatkan masyarakat secara bersama-sama membangun nagari dimuali dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun, baik melalui dana APBN (BLM), APBD Propinsi dan Kabupaten serta Swadaya masyarakat sendiri.

4.2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN / KOTA

4.2.1. Program Dan Kegiatan

Program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2018 berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2012 - 2016, sebahagian besar dapat dilaksanakan walaupun masih ada kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan tahun sebelumnya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kabupaten/Kota antara lain :

1. PNPM-MP dengan kegiatan Pengembangan Dana Bergulir SPP dalam rangka menunjang peningkatan permodalan bagi masyarakat Nagari.

4.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi beberapa kegiatan antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Nagari merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa / nagari dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa / nagari.

Pelayanan prima mengandung Pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti. Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :

1. Berorientasi kepuasan pelanggan.
2. Perbaikan yang kesinambungan.
3. Manajemen berdasarkan fakta.
4. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia.
6. Budaya organisasi adalah moral tinggi.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Nagari karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa / nagari.

Mendasari ketentuan dari prinsip - prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa / Nagari telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain :

1. Pembagian tugas masing - masing kaur.
2. Sistem buka kantor tepat waktu.
3. Pelayanan cepat.
4. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat

Pelaksanaan pada bidang pemerintahan telah dilaksanakan kegiatan guna menunjang program pemerintah serta memberikan layanan yang maksimal pada masyarakat, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan KTP
 - b. Pengurusan Pembuatan IMB
 - c. Bidang Administarsi lainnya
2. Bidang Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan pada bidang sarana dan prasarana meliputi beberapa kegiatan antara lain :

- a. Sarana Transportasi (Pembangunan kesentra usaha masyarakat melalui swadaya masyarakat)

4.2.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka realisasi dari pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2017 meliputi beberapa hal antara lain :

- Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan usaha pertanian yang timbul adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat dengan program-program pemerintah dalam percepatan pembangunan di daerah-daerah yang mendapatkan bantuan sehingga pencapaian target pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan.

Akan tetapi berkat usaha dari Pemerintahan Nagari memberikan dan menyampaikan maksud dan tujuan dari suatu program pemerintah terhadap pembangunan baik fisik maupun non fisik pada suatu daerah, permasalahan yang timbul tersebut dapat diperkecil.

- Faktor lain yang juga menjadi permasalahan adalah faktor cuaca. Faktor cuaca yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan juga menjadi masalah dalam penyelesaian kegiatan, akan tetapi berkat usaha dan arahan kegiatan-kegiatan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan ini tidak terlepas dari kebersamaan dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
- Faktor Kesadaran masyarakat dalam bekerjasama (Gotong Royong) dengan kurangnya rasa kebersamaan dalam membangun nagari hal ini terlihat pada saat dilaksanakan Gotong Royong yang hadir lebih banyak dari para petani dan nelayan sedangkan masyarakat yang bergerak dibidang jasa sangat kecil sekali.

Akan tetapi pemerintah nagari tidak akan bosan untuk mengajak (mengundang) masyarakat yang bergerak dibidang jasa untuk melaksanakan kegiatan gotong royong dalam menunjang pembukaan jalan ke sentra ekonomi masyar

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN PEMBANTU

5.1. TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA

5.1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, instansi pemberi tugas adalah :

- Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Nagari

Untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan pembantu pada pembangunan Nagari Tahun 2018, Nagari telah membentuk Panitia yang terdiri dari :

1. Aparatur Nagari
2. Kepala Kampung

5.1.4. Kegiatan Yang Diterima

Kegiatan Pembantuan yang diterima oleh Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato Pada tahun 2018 ini diantaranya adalah Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh kolektor yang dibentuk oleh pemerintah Nagari melalui Kepala Kampung yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato.

5.1.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Sumber dana dan jumlah Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan tugas dan pembantuan yang diterima selama ini belum mempunyai sumber dana dan anggaran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan pembantuan.

5.1.6. Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan di Nagari Taluk Tigo Sakato ini memang terkendala dengan masih ditemukannya lembaran SPT yang tidak jelas sehingga masyarakat merasa terbebani dengan SPT tersebut.

Permasalahan tersebut diatas telah dicoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat berkeinginan untuk membayar kewajibannya, ditambah dengan banyaknya bantuan yang telah diterima Nagari bila dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada Negara.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

6.1. KERJA SAMA ANTAR NAGARI

6.1.1. Kebijakan Dan Kegiatan

Adapun kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan nagari Taluk Tigo Sakato antara lain Pembangunan Penimbunan dan Pagar TK - PAUD, Pembangunan Parit Miring Parak Pisang – Manjanang, Pembangunan Jembatan Kelompok Tani Bukit Bakuang, Pembangunan Jembatan, Timbunan Jalan dan Parit Miring Jalan Kelompok Tani Bukit Batuang, Pencoran Lantai Jembatan Kampung Panai, Pembangunan Perpustakaan Nagari, Pembangunan Pos Yandu Koto Keduduk, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembuatan Jambanan Masyarakat dengan berkoordinasi dengan pihaka kecamatan batang Kapas dan pihak-pihak yang terkait didalamnya.

6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dari dari kerja sama tersebut telah dilaksanakan secara keseluruhan dan wali nagari memberikan dukungan atas pelaksanaannya sehingga hubungan transportasi berjalan lancar terutama jalan keperkampungan dan transportasi ke perkebunan.

6.1.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya swadaya gotong royong masyarakat dan pemerintahan kabupaten sehingga dalam pengerjaannya hanya menitik beratkan kepada pihak-pihak yang terkait saja..

6.2. KERJASAMA DENGAN DENGAN PIHAK KE III

6.2.1. Kebijakan Dan Kegiatan

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari Taluk Tigo Sakato pada tahun 2018 lebih dititik beratkan pada kegiatan antara lain :

1. Sepak Bola
2. Buayan Kaling

Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari pihak ke III seperti :

1. Perantau (dalam Provinsi maupun di luar Provinsi)
2. Donatur lainnya yang tidak mengikat.

6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan di atas bantuan yang diterima oleh Pemerintahan Nagari dari pihak ke III yang tersebut diatas sangatlah memberikan dorongan dan motivasi guna suksesnya kegiatan tersebut diatas.

6.2.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dirasakan karena terbatasnya jarak dan waktu yang sangat pendek, sehingga masih adanya pihak ke III yang belum terhubung. Untuk menindaklanjuti keterbatasan tersebut pihak Pemerintah Nagari akan berusaha untuk memberikan informasi secepat mungkin pada kegiatan-kegiatan yang akan datang.

6.3. BATAS NAGARI

6.3.1. Kebijakan Dan Kegiatan

Di alam Minangkabau ini untuk Batas-batas Nagari ini selalu mengambil batas alam seperti Bandar, Batang Air dan Jalan, Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Batas Nagari, apalagi Nagari Taluk Tigo Sakato merupakan pemekaran dari Nagari Taluk, yang berbatas sebelah selatan dengan Nagari Koto Taratak.

6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dan Pelaksanaan kegiatan tentang batas Nagari ini Pemerintahan Nagari tidaklah terlalu mengubris dan hanya mempertahankan batas-batas alam yang telah ada dan ditentukan oleh pemimpin yang terdahulu.

6.3.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Sejauh ini sudah sering terjadi permasalahan tata batas antara Nagari Teratak Taluk Tigo Sakato dengan Nagari Koto Taratak maupun dengan nagari tetangga lainnya.

6.4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

6.4.1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Dalam mangantisipasi bahaya yag ditimbulkan akibat bencana yang terjadi, Pemerintahan Nagari telah menyampaikan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana yang bekersama dengan PMI Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :

1. Sosialisasi menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh alam seperti bencana gempa, Tanah Lonsor dan Banjir.
2. Sosialisasi menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti bencana kebakaran.

6.4.2. Status Bencana

Adapun status bencana yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato adalah yang disebabkan oleh Bencana Alam, gempa, banjir.

6.4.3. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Dalam menantisipasi bencana memang dari Pemerintahan Nagari Tidak menganggarkan dana, dan dalam hal ini Pemerintahan Nagari mengharapkan adanya anggaran khusus yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah.

6.4.4. Antislipasi Nagari

Dalam mengantisipasi bencana yang timbul, Pemerintahan Nagari telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat terutama sekali bekerjasama dengan Pelaku PNPM Kecamatan dengan memanfaatkan Dana Ruang Belajar Masyarakat Kecamatan batang Kapas.

6.4.5. Potensi Nagari Yang Diperkirakan Terjadi

Melihat geografis dari Nagari Taluk Tigo Sakato, Potensi bencana yang diperkirakan dapat terjadi di Nagari Taluk Tigo Sakato antara lain :

1. Bencana Longsor

Dibeberapa tempat di Nagari Taluk Tigo Saktto berpotensi untuk terjadinya longsor karena daerah tersebut berupa tebing-tebing, dan dikhawatirkan apabila terjadi longsor akan menimbulkan kerugian baik moril maupun material seperti terdapat di Kampung Tanjung Kandis dan Koto Panjang, terutama sekali akan menimbun Pemukiman Penduduk yang akan menimbulkan korban jiwa.

2. Bencana Kebakaran

Potensi untuk terjadinya bencana kebakaran juga menjadi perhatian bagi Pemerintahan Nagari, karena pada saat musim kemarau datang bencana tersebut menjadi ancaman bagi masyarakat, akan tetapi berkat kerjasam dan pengertian dari masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap bahaya tersebut pada tahun 2016, Nagari Taluk Tigo Sakato terhindar dari bencana kebakaran tersebut.

3. Bencana Gempa

Bencana gempa yang terjadi pada tahun 2007 dan 2009, telah menjadikan sebuah pengalaman yang pahit bagi seluruh masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato karena dengan kejadian tersebut masyarakat banyak yang trauma karena berkembangnya isu bahwa akan adanya gempa susulan yang lebih besar serta mengakibatkan terjadinya tsunami.

6.5. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Satuan Kerja Perangkat Nagari di Nagari Taluk Tigo Sakato yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan dinamis adalah berkat dikoordinir oleh Kaur Pemerintahan dan FKPM serta seluruh elemen dalam masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato.

- a. Kasi pemerintahan melakukan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menyusun program bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di Nagari Taluk Tigo Sakato.
- b. Kasi pemerintahan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Batang Kapas, Polsek Batang Kapas dan Koramil Batang Kapas, melalui Babinmas dan Babinsa yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato.

6.5.1. Gangguan Yang Terjadi

Dalam tahun 2018 gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Nagari Taluk Tigo Sakato tidaklah begitu menjolok atau menonjol yang terjadi adalah gangguan ringan yang dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

6.5.2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Satuan pelaksana kegiatan Nagari Taluk Tigo Sakato dalam pelaksana kegiatan terdiri dari beberapa lembaga antara lain :

1. Kasi Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato.
2. FKPM (forum Kemitraan Perpolisian dan Masyarakat)
3. Ketua Pemuda dimasing masing Kampung
4. Satuan keamanan lainnya seperti Hansip dan Linmas
5. Ronda Malam yang mana kegiatan Ronda malam dilaksanakan disetiap kampung yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato.

6.5.3. Data Perangkat Nagari

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	NOFRIANDI	Wali Nagari	SMK
2	ILNASDI	Sekretaris Nagari	SMEA
3	MASRIL	Kasi Pemerintahan	SLTA
	ERMAYENTI	Kasi Kesra	SLTA
4	ZARLIA MIZA, S.TP	Kaur Perencanaan dan Keuangan	S.I
5	SUSTRY ANDAMI, S.Pd. I	Kaur TU dan Pengarsipan	S.I
6	ERLIANIS	Bendahara Nagari	SMEA
7	MITHA SAFITRI, S.Pd	Staf	S.I
8	NORA MARDANI, ST	Staf	S.I
9	MESY ARIYANI, S.Pd I	Staf	S.I
10	SYAFRIANDI	Kepala Kampung Koto Keduduk	SLTA
11	YULKISMAN	Kepala Kampung Tanjung kandis	SLTA
12	BUSRI WANDRI	Kepala Kampung Koto Panjang	SLTA

6.5.4. Sumber Dana Jumlah Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato mengalokasikan dana untuk menunjang kegiatan Keamanan dan Ketertiban Nagari Taluk Tigo Sakato, adapun sumber dari dana bersumber dari APB Nagari sebesar Rp. 1,234.664.600,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,172.784.982,05,- (89,85 %), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

6.5.5. Penanggulangan Dan Kendalanya

Dalam pelaksana kegiatan gangguan kewan dan ketertiban umum ini memang terkendala dengan dana dan peralatan yang di miliki oleh masing – masing organisasi untuk penanggulangan keamanan dan ketertiban umum ini secara bersama memohon kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana secara khusus untuk meningkatkan Keamanan dan ketertiban.

6.5.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penyelenggaraan

Dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban dari pihak terkait selalu melaksanakan pembinaan dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan Pihak yang ikut serta dalam pembinaan antara lain :

1. Kapolres Pesisir Selatan
2. Dandim Pesisir Selatan
3. Kapolsek Batang Kapas
4. Danramil Batang Kapas dan Dinas terkait lainnya.

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan.

Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah, peningkatan system layanan kepada masyarakat dengan pemenuhan standard ISO di bidang kesehatan.

Selama tahun 2017, terdapat beberapa urusan dalam pelaksanaannya kurang optimal antara lain disebabkan oleh masih dirasakannya dampak krisis ekonomi global Kendala dan permasalahan yang juga dirasakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masih adanya ketidak jelasan pengelolaan urusan yang diatur dalam perundang-undangan dari pemerintah pusat.

Disamping itu terdapat pula peraturan perundang-undangan yang ambivalen, kontradiktif, dan tidak jelas serta sering berubah-ubah. Pada masa-masa mendatang,

Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan visi serta misi Nagari Taluk Tigo Sakato

Semoga Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Taluk tigo Sakato Tahun 2018 ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pelaksanaan tugas yang akan datang

Taluk Tigo Sakato, 29 Desember 2018

